BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 mengatur bahwa ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 akan diatur dalam Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK;

b. Bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran belanja bantuan keuangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh Untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi..../ii

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua...../iii

Peubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah.../iv

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

28. Peraturan..../v

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

36. Peraturan Menteri.....vi

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);

41. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

42. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

43. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;

44. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1 ...../vii

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya ini dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 12 Agustus 2020 M
22 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 13 Agustus 2020 M
23 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T.R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 353

Lampiran Ia PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 21 TAHUN 2020
Tanggal : 12 Agustus 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	**PENDAPATAN**	1.263.481.943.599,14	1.104.034.547.497,14	(159.447.396.102,00)	(12,62)	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	89.412.809.632,14	69.639.778.844,14	(19.773.030.788,00)	(22,11)	
4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	16.086.658.524,00	13.498.716.478,00	(2.587.942.046,00)	(16,09)	
4.1.1.01	Pajak Hotel	41.445.000,00	16.455.000,00	(24.990.000,00)	(60,30)	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	41.445.000,00	16.455.000,00	(24.990.000,00)	(60,30)	
4.1.1.02	Pajak Restoran	2.606.446.800,00	1.591.446.800,00	(1.015.000.000,00)	(38,94)	
4.1.1.02.01	Restoran	2.606.446.800,00	1.591.446.800,00	(1.015.000.000,00)	(38,94)	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	26.328.000,00	13.328.000,00	(13.000.000,00)	(49,38)	
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	15.528.000,00	8.528.000,00	(7.000.000,00)	(45,08)	
4.1.1.03.21	Pajak Keramaian Rakyat	10.800.000,00	4.800.000,00	(6.000.000,00)	(55,56)	
4.1.1.04	Pajak Reklame	566.311.207,00	366.311.207,00	(200.000.000,00)	(35,32)	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	566.311.207,00	366.311.207,00	(200.000.000,00)	(35,32)	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.475.930.000,00	4.275.930.000,00	(200.000.000,00)	(4,47)	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.475.930.000,00	4.275.930.000,00	(200.000.000,00)	(4,47)	
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3.083.146.355,00	2.350.194.309,00	(732.952.046,00)	(23,77)	
4.1.1.06.06	Koral	689.920.077,00	475.944.054,00	(213.976.023,00)	(31,01)	
4.1.1.06.07	Batu Pecah	587.715.241,00	378.739.218,00	(208.976.023,00)	(35,56)	
4.1.1.06.08	Kerikil	954.813.168,00	944.813.168,00	(10.000.000,00)	(1,05)	
4.1.1.06.09	Pasir Kuarsa	588.226.996,00	388.226.996,00	(200.000.000,00)	(34,00)	
4.1.1.06.10	Lempung/ Clay	258.845.873,00	158.845.873,00	(100.000.000,00)	(38,63)	
4.1.1.06.42	Batu Permata/ Berharga Lainnya	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	5.805.000,00	3.805.000,00	(2.000.000,00)	(34,45)	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.805.000,00	3.805.000,00	(2.000.000,00)	(34,45)	
4.1.1.11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	794.691.318,00	694.691.318,00	(100.000.000,00)	(12,58)	
4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	794.691.318,00	694.691.318,00	(100.000.000,00)	(12,58)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.486.554.844,00	4.186.554.844,00	(300.000.000,00)	(6,69)	
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perdesaan	4.317.465.145,00	4.017.465.145,00	(300.000.000,00)	(6,95)	
4.1.1.12.02	PBB Sektor Perkotaan	169.089.699,00	169.089.699,00	0,00	0,00	
4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.170.887.425,00	1.053.798.683,00	(117.088.742,00)	(10,00)	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	382.091.300,00	343.882.170,00	(38.209.130,00)	(10,00)	
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	194.818.000,00	175.336.200,00	(19.481.800,00)	(10,00)	
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	(10,00)	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	174.538.000,00	157.084.200,00	(17.453.800,00)	(10,00)	
4.1.2.01.45	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	9.735.300,00	8.761.770,00	(973.530,00)	(10,00)	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	702.593.000,00	632.333.700,00	(70.259.300,00)	(10,00)	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	277.605.000,00	249.844.500,00	(27.760.500,00)	(10,00)	
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	388.500.000,00	349.650.000,00	(38.850.000,00)	(10,00)	
4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.838.000,00	19.654.200,00	(2.183.800,00)	(10,00)	
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	14.650.000,00	13.185.000,00	(1.465.000,00)	(10,00)	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	86.203.125,00	77.582.813,00	(8.620.312,00)	(10,00)	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	86.203.125,00	77.582.813,00	(8.620.312,00)	(10,00)	
4.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	3.700.000.000,00	1.200.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(67,57)	
4.1.3.01	Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. BANK ACEH	3.700.000.000,00	1.200.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(67,57)	
4.1.3.01.01	Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. BANK ACEH	3.700.000.000,00	1.200.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(67,57)	
4.1.4	**Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah**	7.000.000.000,00	6.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(7,14)	
4.1.4.01	Penerimaan ZIS	7.000.000.000,00	6.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(7,14)	
4.1.4.01.01	Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah	7.000.000.000,00	6.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(7,14)	
4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	61.455.263.683,14	47.387.263.683,14	(14.068.000.000,00)	(22,89)	
4.1.5.02	Penerimaan Jasa Giro	479.001.313,80	380.001.313,80	(99.000.000,00)	(20,67)	
4.1.5.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	479.001.313,80	380.001.313,80	(99.000.000,00)	(20,67)	
4.1.5.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	168.349.103,00	75.349.103,00	(93.000.000,00)	(55,24)	
4.1.5.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	168.349.103,00	75.349.103,00	(93.000.000,00)	(55,24)	
4.1.5.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.026.994.721,00	850.994.721,00	(176.000.000,00)	(17,14)	
4.1.5.11.03	Pendapatan Hibah dari Perusahaan	1.026.994.721,00	850.994.721,00	(176.000.000,00)	(17,14)	
4.1.5.18	Pendapatan Hibah BLUD	42.218.289.451,00	30.218.289.451,00	(12.000.000.000,00)	(28,42)	
4.1.5.18.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum Daerah	42.000.000.000,00	30.000.000.000,00	(12.000.000.000,00)	(28,57)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.5.18.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	201.469.281,00	201.469.281,00	0,00	0,00	
4.1.5.18.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	16.820.170,00	16.820.170,00	0,00	0,00	
4.1.5.19	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional/ JKN	15.970.636.800,00	14.470.636.800,00	(1.500.000.000,00)	(9,39)	
4.1.5.19.02	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Beutong	1.026.000.000,00	826.000.000,00	(200.000.000,00)	(19,49)	
4.1.5.19.03	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Uteun Pulo	956.571.000,00	756.571.000,00	(200.000.000,00)	(20,91)	
4.1.5.19.04	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Jeuram	1.203.630.000,00	1.003.630.000,00	(200.000.000,00)	(16,62)	
4.1.5.19.05	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Cot Kuta	721.327.200,00	621.327.200,00	(100.000.000,00)	(13,86)	
4.1.5.19.06	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Ujong Fatihah	1.269.817.000,00	1.069.817.000,00	(200.000.000,00)	(15,75)	
4.1.5.19.07	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Padang Panjang	753.705.000,00	653.705.000,00	(100.000.000,00)	(13,27)	
4.1.5.19.08	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Padang Rubek	365.104.300,00	365.104.300,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.09	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Suka Mulia	1.173.380.000,00	1.073.380.000,00	(100.000.000,00)	(8,52)	
4.1.5.19.10	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Simpang Jaya	671.044.000,00	671.044.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.11	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Alue Bilie	1.495.205.000,00	1.195.205.000,00	(300.000.000,00)	(20,06)	
4.1.5.19.12	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Alue Rambot	1.226.996.000,00	1.126.996.000,00	(100.000.000,00)	(8,15)	
4.1.5.19.13	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Lueng Keubu Jagat	894.340.000,00	894.340.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.14	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Beutong Ateuh	228.690.000,00	228.690.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.15	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kuala Tadu	359.967.300,00	359.967.300,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.25	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Beutong	696.410.000,00	696.410.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.26	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Uteun Pulo	334.510.000,00	334.510.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.27	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Jeuram	254.980.000,00	254.980.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.28	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Cot Kuta	34.210.000,00	34.210.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.29	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Ujong Fatihah	114.100.000,00	114.100.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.31	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Padang Rubek	89.210.000,00	89.210.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.32	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Suka Mulia	292.710.000,00	292.710.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.33	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Simpang Jaya	138.710.000,00	138.710.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.34	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Alue Bilie	897.100.000,00	897.100.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.35	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Alue Rambot	177.200.000,00	177.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.36	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Lueng Keubeu Jagat	89.100.000,00	89.100.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.37	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Beutong Ateuh	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.38	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kuala Tadu	55.110.000,00	55.110.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.19.39	Dana Non kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Padang Panjang	432.410.000,00	432.410.000,00	0,00	0,00	
4.1.5.24	Pendapatan Dari Pengembalian Tahun Lalu	1.591.992.294,34	1.391.992.294,34	(200.000.000,00)	(12,56)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.5.24.01	Pendapatan Dari Pengembalian Tahun Lalu	1.591.992.294,34	1.391.992.294,34	(200.000.000,00)	(12,56)	
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	744.774.622.000,00	645.660.355.521,00	(99.114.266.479,00)	(13,31)	
4.2.1	**Transfer Umum**	566.877.295.000,00	506.759.420.521,00	(60.117.874.479,00)	(10,61)	
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	16.984.984.000,00	19.071.043.521,00	2.086.059.521,00	12,28	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	8.930.792.000,00	8.572.672.261,00	(358.119.739,00)	(4,01)	
4.2.1.01.03	Bagi hasil dari pajak penghasilan (pph) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri	3.530.632.000,00	4.525.376.922,00	994.744.922,00	28,17	
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	358.075.000,00	279.208.000,00	(78.867.000,00)	(22,03)	
4.2.1.01.08	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	16.052.000,00	27.955.532,00	11.903.532,00	74,16	
4.2.1.01.13	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	1.588.988.903,00	1.086.198.903,00	216,03	
4.2.1.01.14	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	2.309.742.000,00	1.511.059.295,00	(798.682.705,00)	(34,58)	
4.2.1.01.16	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	15.329.000,00	28.416.048,00	13.087.048,00	85,37	
4.2.1.01.19	Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara (Minerba)	1.321.572.000,00	2.537.366.560,00	1.215.794.560,00	92,00	
4.2.1.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	549.892.311.000,00	487.688.377.000,00	(62.203.934.000,00)	(11,31)	
4.2.1.02.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	549.892.311.000,00	487.688.377.000,00	(62.203.934.000,00)	(11,31)	
4.2.2	**Transfer Khusus**	177.897.327.000,00	138.900.935.000,00	(38.996.392.000,00)	(21,92)	
4.2.2.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.961.485.000,00	75.559.785.000,00	(37.401.700.000,00)	(33,11)	
4.2.2.01.01	DAK Bidang Pendidikan	7.258.282.000,00	7.258.282.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01.02	DAK Bidang Kesehatan	50.361.880.000,00	52.551.880.000,00	2.190.000.000,00	4,35	
4.2.2.01.03	DAK Bidang Jalan	31.280.186.000,00	0,00	(31.280.186.000,00)	(100,00)	
4.2.2.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	4.856.664.000,00	1.946.664.000,00	(2.910.000.000,00)	(59,92)	
4.2.2.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	981.689.000,00	0,00	(981.689.000,00)	(100,00)	
4.2.2.01.19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.088.320.000,00	2.088.320.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01.20	DAK Penugasan	16.134.464.000,00	11.714.639.000,00	(4.419.825.000,00)	(27,39)	
4.2.2.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	64.935.842.000,00	63.341.150.000,00	(1.594.692.000,00)	(2,46)	
4.2.2.02.01	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.760.600.000,00	2.593.800.000,00	(166.800.000,00)	(6,04)	
4.2.2.02.02	DAK Tunjangan Profesi Guru	38.135.476.000,00	36.369.682.000,00	(1.765.794.000,00)	(4,63)	
4.2.2.02.03	DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.239.000.000,00	1.309.250.000,00	70.250.000,00	5,67	
4.2.2.02.04	DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.458.840.000,00	12.458.840.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.02.05	DAK Jaminan Persalinan	524.269.000,00	524.269.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.02.06	DAK Bantuan Operasional KB	3.747.500.000,00	3.718.250.000,00	(29.250.000,00)	(0,78)	
4.2.2.02.07	DAK Tunjangan Khusus Guru	2.861.193.000,00	3.206.595.000,00	345.402.000,00	12,07	
4.2.2.02.08	DAK Akreditasi Puskesmas	936.382.000,00	936.382.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.02.09	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	769.554.000,00	769.554.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.02.13	DAK BOP Pendidikan Kesetaraan	1.343.700.000,00	1.295.200.000,00	(48.500.000,00)	(3,61)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.2.02.14	DAK Pengawasan Obat dan Makanan	159.328.000,00	159.328.000,00	0,00	0,00	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	429.294.511.967,00	388.734.413.132,00	(40.560.098.835,00)	(9,45)	
4.3.1	**Pendapatan Hibah**	18.720.800.000,00	17.220.800.000,00	(1.500.000.000,00)	(8,01)	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	18.720.800.000,00	17.220.800.000,00	(1.500.000.000,00)	(8,01)	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	18.720.800.000,00	17.220.800.000,00	(1.500.000.000,00)	(8,01)	
4.3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	65.199.554.206,00	28.094.020.299,00	(37.105.533.907,00)	(56,91)	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	65.199.554.206,00	28.094.020.299,00	(37.105.533.907,00)	(56,91)	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	16.824.075.358,00	6.507.032.614,00	(10.317.042.744,00)	(61,32)	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.879.645.320,00	3.486.990.763,00	(6.392.654.557,00)	(64,71)	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.718.877.650,00	10.323.041.044,00	(10.395.836.606,00)	(50,18)	
4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	170.451.053,00	170.451.053,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	17.606.504.825,00	7.606.504.825,00	(10.000.000.000,00)	(56,80)	
4.3.4	**Dana Penyesuaian**	188.911.184.000,00	186.512.030.000,00	(2.399.154.000,00)	(1,27)	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	188.911.184.000,00	186.512.030.000,00	(2.399.154.000,00)	(1,27)	
4.3.4.01.01	Dana Alokasi Desa	178.270.549.000,00	175.871.395.000,00	(2.399.154.000,00)	(1,35)	
4.3.4.01.07	Dana Insentif Daerah	10.640.635.000,00	10.640.635.000,00	0,00	0,00	
4.3.5	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	156.462.973.761,00	156.907.562.833,00	444.589.072,00	0,28	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	156.462.973.761,00	156.907.562.833,00	444.589.072,00	0,28	
4.3.5.01.07	Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh	121.271.173.761,00	101.715.762.833,00	(19.555.410.928,00)	(16,13)	
4.3.5.01.08	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/ Kota	35.191.800.000,00	55.191.800.000,00	20.000.000.000,00	56,83	
5	**BELANJA**	1.293.481.943.599,14	1.109.346.539.263,40	(184.135.404.335,74)	(14,24)	
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	636.071.328.060,40	643.490.632.420,40	7.419.304.360,00	1,17	
5.1.1	**Belanja Pegawai**	363.352.127.514,00	345.991.278.514,00	(17.360.849.000,00)	(4,78)	
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	307.822.146.514,00	304.491.053.514,00	(3.331.093.000,00)	(1,08)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	196.153.138.947,00	194.149.900.947,00	(2.003.238.000,00)	(1,02)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	18.392.490.288,00	18.392.490.288,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Struktural	6.537.338.950,00	6.553.438.950,00	16.100.000,00	0,25	
5.1.1.01.06	Tunjangan Fungsional	11.661.720.798,00	11.662.920.798,00	1.200.000,00	0,01	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.07	Tunjangan Fungsional Umum	3.339.666.190,00	3.339.666.190,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.961.132,00	2.961.132,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.10	Tunjangan Beras	11.920.018.134,00	11.920.018.134,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Pajak	305.124.809,00	310.111.809,00	4.987.000,00	1,63	
5.1.1.01.12	Tunjangan BPJS Kesehatan 4%	8.594.222.662,00	8.594.222.662,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	26.324.025,00	26.324.025,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.719.075,00	7.719.075,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Uang Paket	52.143.000,00	52.143.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Panitia Musyawarah	23.948.925,00	23.948.925,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.17	Tunjangan Komisi	38.001.600,00	38.001.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Perumahan	2.728.800.000,00	2.728.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.23	Tunjangan Transportasi	3.168.000.000,00	3.168.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.24	Belanja Penunjang Operasional DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.25	Tunjangan Panitia Legislasi	10.094.175,00	10.094.175,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.26	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	470.432.490,00	470.432.490,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.27	Tunjangan Jaminan Kematian	1 410.952.314,00	1.410.952.314,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.28	Tunjangan Profesi Guru	38.295.476.000,00	36.529.682.000,00	(1.765.794.000,00)	(4,61)	PMK Nomor 35/PMK.07/2020, Tentang TKDD 2020
5.1.1.01.29	Tunjangan Khusus Guru	2.861.193.000,00	3.206.595.000,00	345.402.000,00	12,07	PMK Nomor 35/PMK.07/2020, Tentang TKDD 2020
5.1.1.01.31	Tunjangan Reses	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.32	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru	1.239.000.000,00	1.309.250.000,00	70.250.000,00	5,67	PMK Nomor 35/PMK.07/2020, Tentang TKDD 2020
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	50.301.555.000,00	36.898.425.000,00	(13.403.130.000,00)	(26,65)	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	952.700.000,00	952.700.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	123.300.000,00	123.300.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	3.409.550.000,00	3.409.550.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	3.326.100.000,00	3.326.100.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	42.489.905.000,00	29.086.775.000,00	(13.403.130.000,00)	(31,54)	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.290.000.000,00	2.290.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRK	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	350.000.000,00	250.000.000,00	(100.000.000,00)	(28,57)	
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	350.000.000,00	250.000.000,00	(100.000.000,00)	(28,57)	
5.1.1.08	Biaya Kekurangan Penyetoran BPJS / ASKES	2.511.626.000,00	2.000.600.000,00	(511.026.000,00)	(20,35)	
5.1.1.08.02	Biaya Penyetoran BPJS / ASKES	2.511.626.000,00	2.000.600.000,00	(511.026.000,00)	(20,35)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.09	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	76.800.000,00	61.200.000,00	(15.600.000,00)	(20,31)	
5.1.1.09.03	Insentif Pemungutan Pajak Bumi Bangunan	76.800.000,00	61.200.000,00	(15.600.000,00)	(20,31)	
5.1.4	**Belanja Hibah**	4.749.300.000,00	4.534.000.000,00	(215.300.000,00)	(4,53)	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	4.749.300.000,00	4.534.000.000,00	(215.300.000,00)	(4,53)	
5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	4.749.300.000,00	4.534.000.000,00	(215.300.000,00)	(4,53)	
5.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	5.344.500.000,00	7.144.500.000,00	1.800.000.000,00	33,68	
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	2.475.000.000,00	4.275.000.000,00	1.800.000.000,00	72,73	
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	2.475.000.000,00	4.275.000.000,00	1.800.000.000,00	72,73	
5.1.5.06	Belanja Bantuan Sosial Yang Dapat Direncanakan	2.869.500.000,00	2.869.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.06.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Dapat Direncanakan	2.869.500.000,00	2.869.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	3.451.509.188,00	3.451.509.188,00	0,00	0,00	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.217.331.704,00	3.217.331.704,00	0,00	0,00	
5.1.6.03.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa	3.217.331.704,00	3.217.331.704,00	0,00	0,00	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	234.177.484,00	234.177.484,00	0,00	0,00	
5.1.6.05.01	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa	234.177.484,00	234.177.484,00	0,00	0,00	
5.1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan**	257.673.891.358,40	257.052.144.718,40	(621.746.640,00)	(0,24)	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	473.985.403,40	473.985.403,40	0,00	0,00	
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	473.985.403,40	473.985.403,40	0,00	0,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.695.412.890,00	1.695.412.890,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	210.658.050,00	210.658.050,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Aceh	189.908.820,00	189.908.820,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai NASDEM	100.761.300,00	100.761.300,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	483.183.900,00	483.183.900,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	117.223.200,00	117.223.200,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	137.447.820,00	137.447.820,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	77.696.550,00	77.696.550,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Kepada Partai Bulan Bintang	68.181.210,00	68.181.210,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Nanggroe Aceh	100.797.480,00	100.797.480,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Kepada Partai SIRA	209.554.560,00	209.554.560,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Kuala (Dana Desa dari APBN)	13.555.389.000,00	13.371.670.000,00	(183.719.000,00)	(1,36)	
5.1.7.08.01	Gampong Lawa Batu (APBN)	845.779.000,00	834.972.000,00	(10.807.000,00)	(1,28)	
5.1.7.08.02	Gampong Jogja (APBN)	736.663.000,00	725.856.000,00	(10.807.000,00)	(1,47)	
5.1.7.08.03	Gampong Ujong Sikuneng (APBN)	731.099.000,00	720.292.000,00	(10.807.000,00)	(1,48)	
5.1.7.08.04	Gampong Blang Muko (APBN)	929.033.000,00	918.226.000,00	(10.807.000,00)	(1,16)	
5.1.7.08.05	Gampong Pulo Ie (APBN)	778.846.000,00	768.039.000,00	(10.807.000,00)	(1,39)	
5.1.7.08.06	Gampong Purworejo (APBN)	746.462.000,00	735.655.000,00	(10.807.000,00)	(1,45)	
5.1.7.08.07	Gampong Blang Baro (APBN)	763.354.000,00	752.547.000,00	(10.807.000,00)	(1,42)	
5.1.7.08.08	Gampong Alue Ie Mameh (APBN)	729.597.000,00	718.790.000,00	(10.807.000,00)	(1,48)	
5.1.7.08.09	Gampong Ujong Pasi (APBN)	781.875.000,00	771.068.000,00	(10.807.000,00)	(1,38)	
5.1.7.08.10	Gampong Simpang Peut (APBN)	864.847.000,00	854.040.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)	
5.1.7.08.11	Gampong Blang Teungoh (APBN)	724.284.000,00	713.477.000,00	(10.807.000,00)	(1,49)	
5.1.7.08.12	Gampong Ujong Padang (APBN)	742.289.000,00	731.482.000,00	(10.807.000,00)	(1,46)	
5.1.7.08.13	Gampong Cot Kumbang (APBN)	782.571.000,00	771.764.000,00	(10.807.000,00)	(1,38)	
5.1.7.08.14	Gampong Blang Bintang (APBN)	758.498.000,00	747.691.000,00	(10.807.000,00)	(1,42)	
5.1.7.08.15	Gampong Ujong Patihah (APBN)	979.783.000,00	968.976.000,00	(10.807.000,00)	(1,10)	
5.1.7.08.16	Gampong Kuta Makmue (APBN)	769.748.000,00	758.941.000,00	(10.807.000,00)	(1,40)	
5.1.7.08.17	Gampong Gunong Reuso (APBN)	890.661.000,00	879.854.000,00	(10.807.000,00)	(1,21)	
5.1.7.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Seunagan Timur (Dana Desa dari APBN)	25.515.658.000,00	25.148.220.000,00	(367.438.000,00)	(1,44)	
5.1.7.09.01	Gampong Blang Panyang (APBN)	704.091.000,00	693.284.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.09.02	Gampong Meugat Meh (APBN)	708.986.000,00	698.179.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.09.03	Gampong Lhok Pange (APBN)	712.577.000,00	701.770.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.09.04	Gampong Blang Lango (APBN)	729.406.000,00	718.599.000,00	(10.807.000,00)	(1,48)	
5.1.7.09.05	Gampong Tuwi Meuleusong (APBN)	778.744.000,00	767.937.000,00	(10.807.000,00)	(1,39)	
5.1.7.09.06	Gampong Blang Geudong (APBN)	863.346.000,00	852.539.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)	
5.1.7.09.07	Gampong Blang Teungku (APBN)	718.715.000,00	707.908.000,00	(10.807.000,00)	(1,50)	
5.1.7.09.08	Gampong Sawang Mane (APBN)	708.599.000,00	697.792.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.09.09	Gampong Keude Neulop (APBN)	700.422.000,00	689.615.000,00	(10.807.000,00)	(1,54)	
5.1.7.09.10	Gampong Kila (APBN)	713.761.000,00	702.954.000,00	(10.807.000,00)	(1,51)	
5.1.7.09.11	Gampong Kandeh (APBN)	982.626.000,00	971.819.000,00	(10.807.000,00)	(1,10)	
5.1.7.09.12	Gampong Cot Gud (APBN)	707.406.000,00	696.599.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.09.13	Gampong Kabu Baroh (APBN)	704.791.000,00	693.984.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.09.14	Gampong Kabu Tunong (APBN)	710.632.000,00	699.825.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.09.15	Gampong Keude Linteung (APBN)	708.776.000,00	697.969.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.09.16	Gampong Meurandeh Suak (APBN)	751.713.000,00	740.906.000,00	(10.807.000,00)	(1,44)	
5.1.7.09.17	Gampong Uteun Pulo (APBN)	718.533.000,00	707.726.000,00	(10.807.000,00)	(1,50)	
5.1.7.09.18	Gampong Cot Manyang (APBN)	714.426.000,00	703.619.000,00	(10.807.000,00)	(1,51)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.09.19	Gampong Pulo Teungoh (APBN)	712.849.000,00	702.042.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.09.20	Gampong Cot Dirul (APBN)	852.651.000,00	841.844.000,00	(10.807.000,00)	(1,27)	
5.1.7.09.21	Gampong Cot Teuku Dek (APBN)	708.325.000,00	697.518.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.09.22	Gampong Sapeng (APBN)	703.443.000,00	692.636.000,00	(10.807.000,00)	(1,54)	
5.1.7.09.23	Gampong Peuleukung (APBN)	699.804.000,00	688.997.000,00	(10.807.000,00)	(1,54)	
5.1.7.09.24	Gampong Paya (APBN)	709.252.000,00	698.445.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.09.25	Gampong Blang Preh (APBN)	862.451.000,00	851.644.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)	
5.1.7.09.26	Gampong Blang Ara Keude (APBN)	693.517.000,00	682.710.000,00	(10.807.000,00)	(1,56)	
5.1.7.09.27	Gampong Blang Ara Gampong (APBN)	712.787.000,00	701.980.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.09.28	Gampong Ie Beudoh (APBN)	727.284.000,00	716.477.000,00	(10.807.000,00)	(1,49)	
5.1.7.09.29	Gampong Blang Bayu (APBN)	739.662.000,00	728.855.000,00	(10.807.000,00)	(1,46)	
5.1.7.09.30	Gampong Mon Bateung (APBN)	884.190.000,00	873.383.000,00	(10.807.000,00)	(1,22)	
5.1.7.09.31	Gampong Suak Peureubong (APBN)	745.586.000,00	734.779.000,00	(10.807.000,00)	(1,45)	
5.1.7.09.32	Gampong Krueng Kulu (APBN)	845.868.000,00	835.061.000,00	(10.807.000,00)	(1,28)	
5.1.7.09.33	Gampong Cot Punti (APBN)	852.228.000,00	841.421.000,00	(10.807.000,00)	(1,27)	
5.1.7.09.34	Gampong Lhok Mesjid (APBN)	728.211.000,00	717.404.000,00	(10.807.000,00)	(1,48)	
5.1.7.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Seunagan (Dana Desa dari APBN)	25.194.524.000,00	24.816.279.000,00	(378.245.000,00)	(1,50)	
5.1.7.10.01	Gampong Jeuram (APBN)	690.022.000,00	679.215.000,00	(10.807.000,00)	(1,57)	
5.1.7.10.02	Gampong Pante Ceureumen (APBN)	717.557.000,00	706.750.000,00	(10.807.000,00)	(1,51)	
5.1.7.10.03	Gampong Kuta Baro Jeuram (APBN)	706.493.000,00	695.686.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.10.04	Gampong Parom (APBN)	707.977.000,00	697.170.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.10.05	Gampong Peureulak (APBN)	706.433.000,00	695.626.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.10.06	Gampong Kuta Sayeh (APBN)	711.569.000,00	700.762.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.10.07	Gampong Blang Baro (APBN)	726.265.000,00	715.458.000,00	(10.807.000,00)	(1,49)	
5.1.7.10.08	Gampong Padang (APBN)	715.621.000,00	704.814.000,00	(10.807.000,00)	(1,51)	
5.1.7.10.09	Gampong Alue Tho (APBN)	747.751.000,00	736.944.000,00	(10.807.000,00)	(1,45)	
5.1.7.10.10	Gampong Lhok Parom (APBN)	706.545.000,00	695.738.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.10.11	Gampong Sapek (APBN)	747.634.000,00	736.827.000,00	(10.807.000,00)	(1,45)	
5.1.7.10.12	Gampong Alue Dodok (APBN)	702.254.000,00	691.447.000,00	(10.807.000,00)	(1,54)	
5.1.7.10.13	Gampong Cot Kumbang (APBN)	709.213.000,00	698.406.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.10.14	Gampong Nigan (APBN)	708.471.000,00	697.664.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.10.15	Gampong Gampong Cot (APBN)	729.347.000,00	718.540.000,00	(10.807.000,00)	(1,48)	
5.1.7.10.16	Gampong Blang Pateuk (APBN)	722.414.000,00	711.607.000,00	(10.807.000,00)	(1,50)	
5.1.7.10.17	Gampong Blang Puuk Nigan (APBN)	696.304.000,00	685.497.000,00	(10.807.000,00)	(1,55)	
5.1.7.10.18	Gampong Krueng Ceh (APBN)	748.322.000,00	737.515.000,00	(10.807.000,00)	(1,44)	
5.1.7.10.19	Gampong Bantan (APBN)	727.358.000,00	716.551.000,00	(10.807.000,00)	(1,49)	
5.1.7.10.20	Gampong Cot Lele (APBN)	703.568.000,00	692.761.000,00	(10.807.000,00)	(1,54)	
5.1.7.10.21	Gampong Rambong Rayeuk (APBN)	706.738.000,00	695.931.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.10.22	Gampong Paya Udeung (APBN)	709.699.000,00	698.892.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.10.23	Gampong Kuta Kumbang (APBN)	720.117.000,00	709.310.000,00	(10.807.000,00)	(1,50)	
5.1.7.10.24	Gampong Alue Buloh (APBN)	713.411.000,00	702.604.000,00	(10.807.000,00)	(1,51)	
5.1.7.10.25	Gampong Kuta Paya (APBN)	714.654.000,00	703.847.000,00	(10.807.000,00)	(1,51)	
5.1.7.10.26	Gampong Krueng Ceuko (APBN)	713.371.000,00	702.564.000,00	(10.807.000,00)	(1,51)	
5.1.7.10.27	Gampong Lhok Padang (APBN)	719.046.000,00	708.239.000,00	(10.807.000,00)	(1,50)	
5.1.7.10.28	Gampong Kuta Aceh (APBN)	706.372.000,00	695.565.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.10.29	Gampong Krueng Mangkom (APBN)	819.094.000,00	808.287.000,00	(10.807.000,00)	(1,32)	
5.1.7.10.30	Gampong Latong (APBN)	722.095.000,00	711.288.000,00	(10.807.000,00)	(1,50)	
5.1.7.10.31	Gampong Paya Undan (APBN)	719.438.000,00	708.631.000,00	(10.807.000,00)	(1,50)	
5.1.7.10.32	Gampong Blang Puuk Kulu (APBN)	713.274.000,00	702.467.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.10.33	Gampong Blang Murong (APBN)	757.587.000,00	746.780.000,00	(10.807.000,00)	(1,43)	
5.1.7.10.34	Gampong Kulu (APBN)	708.308.000,00	697.501.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.10.35	Gampong Rambong Cut (APBN)	720.202.000,00	709.395.000,00	(10.807.000,00)	(1,50)	
5.1.7.11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Beutong (Dana Desa dari APBN)	19.037.460.000,00	18.778.092.000,00	(259.368.000,00)	(1,36)	
5.1.7.11.01	Gampong Blang Seunong (APBN)	811.240.000,00	800.433.000,00	(10.807.000,00)	(1,33)	
5.1.7.11.02	Gampong Pante Ara (APBN)	797.876.000,00	787.069.000,00	(10.807.000,00)	(1,35)	
5.1.7.11.03	Gampong Gunong Nagan (APBN)	750.957.000,00	740.150.000,00	(10.807.000,00)	(1,44)	
5.1.7.11.04	Gampong Tuwi Bunta (APBN)	747.586.000,00	736.779.000,00	(10.807.000,00)	(1,45)	
5.1.7.11.05	Gampong Blang Mesjid (APBN)	782.856.000,00	772.049.000,00	(10.807.000,00)	(1,38)	
5.1.7.11.06	Gampong Blang Neuang (APBN)	764.887.000,00	754.080.000,00	(10.807.000,00)	(1,41)	
5.1.7.11.07	Gampong Panton Bayam (APBN)	780.933.000,00	770.126.000,00	(10.807.000,00)	(1,38)	
5.1.7.11.08	Gampong Blang Baro P.Raga (APBN)	710.266.000,00	699.459.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.11.09	Gampong Krueng Cut (APBN)	730.812.000,00	720.005.000,00	(10.807.000,00)	(1,48)	
5.1.7.11.10	Gampong Blang Leumak (APBN)	877.049.000,00	866.242.000,00	(10.807.000,00)	(1,23)	
5.1.7.11.11	Gampong Babah Krueng (APBN)	779.597.000,00	768.790.000,00	(10.807.000,00)	(1,39)	
5.1.7.11.12	Gampong Blang Seumot (APBN)	810.127.000,00	799.320.000,00	(10.807.000,00)	(1,33)	
5.1.7.11.13	Gampong Lhok Seumot (APBN)	827.797.000,00	816.990.000,00	(10.807.000,00)	(1,31)	
5.1.7.11.14	Gampong Meunasah Pante (APBN)	739.317.000,00	728.510.000,00	(10.807.000,00)	(1,46)	
5.1.7.11.15	Gampong Kuta Jeumpa (APBN)	883.694.000,00	872.887.000,00	(10.807.000,00)	(1,22)	
5.1.7.11.16	Gampong Blang Dalam (APBN)	791.309.000,00	780.502.000,00	(10.807.000,00)	(1,37)	
5.1.7.11.17	Gampong Keude Seumot (APBN)	718.878.000,00	708.071.000,00	(10.807.000,00)	(1,50)	
5.1.7.11.18	Gampong Blang Baro Rambong (APBN)	947.219.000,00	936.412.000,00	(10.807.000,00)	(1,14)	
5.1.7.11.19	Gampong Ujong Blang (APBN)	784.248.000,00	773.441.000,00	(10.807.000,00)	(1,38)	
5.1.7.11.20	Gampong Meunasah Krueng (APBN)	782.903.000,00	772.096.000,00	(10.807.000,00)	(1,38)	
5.1.7.11.21	Gampong Meunasah Dayah (APBN)	742.329.000,00	731.522.000,00	(10.807.000,00)	(1,46)	
5.1.7.11.22	Gampong Meunasah Teungoh (APBN)	786.051.000,00	775.244.000,00	(10.807.000,00)	(1,37)	
5.1.7.11.23	Gampong Kulam Jerneh (APBN)	892.048.000,00	881.241.000,00	(10.807.000,00)	(1,21)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.11.24	Gampong Bumi Sari (APBN)	797.481.000,00	786.674.000,00	(10.807.000,00)	(1,36)	
5.1.7.12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Darul Makmur (Dana Desa dari APBN)	36.434.306.000,00	36.002.029.000,00	(432.277.000,00)	(1,19)	
5.1.7.12.01	Gampong Lamie (APBN)	882.280.000,00	871.473.000,00	(10.807.000,00)	(1,22)	
5.1.7.12.02	Gampong Kuta Trieng (APBN)	841.654.000,00	830.847.000,00	(10.807.000,00)	(1,28)	
5.1.7.12.03	Gampong Gelanggang Gajah (APBN)	863.349.000,00	852.542.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)	
5.1.7.12.04	Gampong Kayee Unoe (APBN)	762.779.000,00	751.972.000,00	(10.807.000,00)	(1,42)	
5.1.7.12.05	Gampong Blang Baro (APBN)	773.360.000,00	762.553.000,00	(10.807.000,00)	(1,40)	
5.1.7.12.06	Gampong Alue Bilie (APBN)	736.975.000,00	726.168.000,00	(10.807.000,00)	(1,47)	
5.1.7.12.07	Gampong Suka Raja (APBN)	740.287.000,00	729.480.000,00	(10.807.000,00)	(1,46)	
5.1.7.12.08	Gampong Gunong Cut (APBN)	930.108.000,00	919.301.000,00	(10.807.000,00)	(1,16)	
5.1.7.12.09	Gampong Suka Jadi (APBN)	735.862.000,00	725.055.000,00	(10.807.000,00)	(1,47)	
5.1.7.12.10	Gampong Tuwi Buya (APBN)	788.429.000,00	777.622.000,00	(10.807.000,00)	(1,37)	
5.1.7.12.11	Gampong Ujong Lamie (APBN)	1.130.591.000,00	1.119.784.000,00	(10.807.000,00)	(0,96)	
5.1.7.12.12	Gampong Suak Palembang (APBN)	863.925.000,00	853.118.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)	
5.1.7.12.13	Gampong Alue Waki (APBN)	1.329.882.000,00	1.319.075.000,00	(10.807.000,00)	(0,81)	
5.1.7.12.14	Gampong Alue Geutah (APBN)	773.092.000,00	762.285.000,00	(10.807.000,00)	(1,40)	
5.1.7.12.15	Gampong Krueng Alem (APBN)	1.094.054.000,00	1.083.247.000,00	(10.807.000,00)	(0,99)	
5.1.7.12.16	Gampong Alue Rambot (APBN)	1.057.451.000,00	1.046.644.000,00	(10.807.000,00)	(1,02)	
5.1.7.12.17	Gampong Krueng Seumayam (APBN)	1.352.686.000,00	1.341.879.000,00	(10.807.000,00)	(0,80)	
5.1.7.12.18	Gampong Pulo Teungoh (APBN)	1.024.114.000,00	1.013.307.000,00	(10.807.000,00)	(1,06)	
5.1.7.12.19	Gampong Karang Anyer (APBN)	880.931.000,00	870.124.000,00	(10.807.000,00)	(1,23)	
5.1.7.12.20	Gampong Kuala Seumayam (APBN)	836.093.000,00	825.286.000,00	(10.807.000,00)	(1,29)	
5.1.7.12.21	Gampong Pulo Ie (APBN)	772.804.000,00	761.997.000,00	(10.807.000,00)	(1,40)	
5.1.7.12.22	Gampong Pulo Kruet (APBN)	783.201.000,00	772.394.000,00	(10.807.000,00)	(1,38)	
5.1.7.12.23	Gampong Alue Kuyun (APBN)	754.103.000,00	743.296.000,00	(10.807.000,00)	(1,43)	
5.1.7.12.24	Gampong Alue Raya (APBN)	1.339.341.000,00	1.328.537.000,00	(10.804.000,00)	(0,81)	
5.1.7.12.25	Gampong Alue Jampak (APBN)	784.924.000,00	774.117.000,00	(10.807.000,00)	(1,38)	
5.1.7.12.26	Gampong Suka Mulia (APBN)	735.934.000,00	725.127.000,00	(10.807.000,00)	(1,47)	
5.1.7.12.27	Gampong Simpang Dua (APBN)	770.321.000,00	759.514.000,00	(10.807.000,00)	(1,40)	
5.1.7.12.28	Gampong Sido Jadi (APBN)	745.083.000,00	734.276.000,00	(10.807.000,00)	(1,45)	
5.1.7.12.29	Gampong Serba Jadi (APBN)	929.487.000,00	918.680.000,00	(10.807.000,00)	(1,16)	
5.1.7.12.30	Gampong Serba Guna (APBN)	868.548.000,00	857.741.000,00	(10.807.000,00)	(1,24)	
5.1.7.12.31	Gampong Panton Bayu (APBN)	820.251.000,00	809.444.000,00	(10.807.000,00)	(1,32)	
5.1.7.12.32	Gampong Sp. Deli Kilang (APBN)	723.340.000,00	712.533.000,00	(10.807.000,00)	(1,49)	
5.1.7.12.33	Gampong Ujong Tanjong (APBN)	1.031.627.000,00	1.020.820.000,00	(10.807.000,00)	(1,05)	
5.1.7.12.34	Gampong Suka Ramai (APBN)	761.268.000,00	750.461.000,00	(10.807.000,00)	(1,42)	
5.1.7.12.35	Gampong Ladang Baro (APBN)	754.187.000,00	743.380.000,00	(10.807.000,00)	(1,43)	
5.1.7.12.36	Gampong Alue Bateung Brok (APBN)	1.124.450.000,00	1.113.643.000,00	(10.807.000,00)	(0,96)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.12.37	Gampong Sp. Deli Kampong (APBN)	1.051.831.000,00	1.041.024.000,00	(10.807.000,00)	(1,03)	
5.1.7.12.38	Gampong Blang Luah (APBN)	1.121.484.000,00	1.110.677.000,00	(10.807.000,00)	(0,96)	
5.1.7.12.39	Gampong Sumber Makmur (APBN)	906.528.000,00	895.721.000,00	(10.807.000,00)	(1,19)	
5.1.7.12.40	Gampong Makarti Jaya (APBN)	1.257.692.000,00	1.246.885.000,00	(10.807.000,00)	(0,86)	
5.1.7.13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Suka Makmue (Dana Desa dari APBN)	14.373.624.000,00	14.168.291.000,00	(205.333.000,00)	(1,43)	
5.1.7.13.01	Gampong Lueng Baro (APBN)	907.685.000,00	896.878.000,00	(10.807.000,00)	(1,19)	
5.1.7.13.02	Gampong Alue Kambuk (APBN)	865.406.000,00	854.599.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)	
5.1.7.13.03	Gampong Kuta Padang (APBN)	716.995.000,00	706.188.000,00	(10.807.000,00)	(1,51)	
5.1.7.13.04	Gampong Suak Bilie (APBN)	904.124.000,00	893.317.000,00	(10.807.000,00)	(1,20)	
5.1.7.13.05	Gampong Macah (APBN)	785.341.000,00	774.534.000,00	(10.807.000,00)	(1,38)	
5.1.7.13.06	Gampong Seumambek (APBN)	727.216.000,00	716.409.000,00	(10.807.000,00)	(1,49)	
5.1.7.13.07	Gampong Cot Kuta (APBN)	763.699.000,00	752.892.000,00	(10.807.000,00)	(1,42)	
5.1.7.13.08	Gampong Kabu Blang Sapek (APBN)	713.263.000,00	702.456.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.13.09	Gampong Cot Peuradi (APBN)	712.800.000,00	701.993.000,00	(10.807.000,00)	(1,52)	
5.1.7.13.10	Gampong Blang Sapek (APBN)	725.699.000,00	714.892.000,00	(10.807.000,00)	(1,49)	
5.1.7.13.11	Gampong Lhok Beutong (APBN)	708.649.000,00	697.842.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.13.12	Gampong Gampong Teungoh (APBN)	718.568.000,00	707.761.000,00	(10.807.000,00)	(1,50)	
5.1.7.13.13	Gampong Lhok Rameuan (APBN)	732.235.000,00	721.428.000,00	(10.807.000,00)	(1,48)	
5.1.7.13.14	Gampong Blang Muling (APBN)	738.190.000,00	727.383.000,00	(10.807.000,00)	(1,46)	
5.1.7.13.15	Gampong Krak Tampai (APBN)	753.674.000,00	742.867.000,00	(10.807.000,00)	(1,43)	
5.1.7.13.16	Gampong Meureubo (APBN)	723.548.000,00	712.741.000,00	(10.807.000,00)	(1,49)	
5.1.7.13.17	Gampong Kuta Baro BLang Muling (APBN)	718.975.000,00	708.168.000,00	(10.807.000,00)	(1,50)	
5.1.7.13.18	Gampong Alue Peusaja (APBN)	749.252.000,00	738.445.000,00	(10.807.000,00)	(1,44)	
5.1.7.13.19	Gampong Alue Gajah (APBN)	708.305.000,00	697.498.000,00	(10.807.000,00)	(1,53)	
5.1.7.14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Kuala Pesisir (Dana Desa dari APBN)	12.246.457.000,00	12.073.545.000,00	(172.912.000,00)	(1,41)	
5.1.7.14.01	Gampong Suak Puntong (APBN)	745.753.000,00	734.946.000,00	(10.807.000,00)	(1,45)	
5.1.7.14.02	Gampong Gampong Lhok (APBN)	725.493.000,00	714.686.000,00	(10.807.000,00)	(1,49)	
5.1.7.14.03	Gampong Kuala Baro (APBN)	769.048.000,00	758.241.000,00	(10.807.000,00)	(1,41)	
5.1.7.14.04	Gampong Padang Rubek (APBN)	800.274.000,00	789.467.000,00	(10.807.000,00)	(1,35)	
5.1.7.14.05	Gampong Pulo (APBN)	857.524.000,00	846.717.000,00	(10.807.000,00)	(1,26)	
5.1.7.14.06	Gampong Langkak (APBN)	849.475.000,00	838.668.000,00	(10.807.000,00)	(1,27)	
5.1.7.14.07	Gampong Kuala Tuha (APBN)	735.192.000,00	724.385.000,00	(10.807.000,00)	(1,47)	
5.1.7.14.08	Gampong Kubang Gajah (APBN)	725.082.000,00	714.275.000,00	(10.807.000,00)	(1,49)	
5.1.7.14.09	Gampong Kuala Trang (APBN)	769.449.000,00	758.642.000,00	(10.807.000,00)	(1,40)	
5.1.7.14.10	Gampong Cot Rambong (APBN)	756.153.000,00	745.346.000,00	(10.807.000,00)	(1,43)	
5.1.7.14.11	Gampong Padang Panyang (APBN)	773.912.000,00	763.105.000,00	(10.807.000,00)	(1,40)	
5.1.7.14.12	Gampong Arongan (APBN)	717.873.000,00	707.066.000,00	(10.807.000,00)	(1,51)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.14.13	Gampong Jati Rejo (APBN)	776.500.000,00	765.693.000,00	(10.807.000,00)	(1,39)	
5.1.7.14.14	Gampong Purwodadi (APBN)	762.481.000,00	751.674.000,00	(10.807.000,00)	(1,42)	
5.1.7.14.15	Gampong Lueng Teuku Ben (APBN)	732.137.000,00	721.330.000,00	(10.807.000,00)	(1,48)	
5.1.7.14.16	Gampong Purwosari (APBN)	750.111.000,00	739.304.000,00	(10.807.000,00)	(1,44)	
5.1.7.15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Tadu Raya (Dana Desa dari APBN)	17.661.162.000,00	17.423.408.000,00	(237.754.000,00)	(1,35)	
5.1.7.15.01	Gampong Alue Bata (APBN)	813.766.000,00	802.959.000,00	(10.807.000,00)	(1,33)	
5.1.7.15.02	Gampong Gunong Sapek (APBN)	751.686.000,00	740.879.000,00	(10.807.000,00)	(1,44)	
5.1.7.15.03	Gampong Sarah Mantok (APBN)	751.492.000,00	740.685.000,00	(10.807.000,00)	(1,44)	
5.1.7.15.04	Gampong Pasie Luah (APBN)	739.581.000,00	728.774.000,00	(10.807.000,00)	(1,46)	
5.1.7.15.05	Gampong Gunong Geulugo (APBN)	905.542.000,00	894.735.000,00	(10.807.000,00)	(1,19)	
5.1.7.15.06	Gampong Keupok (APBN)	739.832.000,00	729.025.000,00	(10.807.000,00)	(1,46)	
5.1.7.15.07	Gampong Gunong Pungki (APBN)	829.074.000,00	818.267.000,00	(10.807.000,00)	(1,30)	
5.1.7.15.08	Gampong Alue Siron (APBN)	830.701.000,00	819.894.000,00	(10.807.000,00)	(1,30)	
5.1.7.15.09	Gampong Cot Mue (APBN)	815.832.000,00	805.025.000,00	(10.807.000,00)	(1,32)	
5.1.7.15.10	Gampong Babah Rot (APBN)	775.562.000,00	764.755.000,00	(10.807.000,00)	(1,39)	
5.1.7.15.11	Gampong Babah Dua (APBN)	833.438.000,00	822.631.000,00	(10.807.000,00)	(1,30)	
5.1.7.15.12	Gampong Batu Raja (APBN)	914.420.000,00	903.613.000,00	(10.807.000,00)	(1,18)	
5.1.7.15.13	Gampong Simpang Jaya (APBN)	726.373.000,00	715.566.000,00	(10.807.000,00)	(1,49)	
5.1.7.15.14	Gampong Sumber Daya (APBN)	764.156.000,00	753.349.000,00	(10.807.000,00)	(1,41)	
5.1.7.15.15	Gampong Ranto Selamat (APBN)	756.776.000,00	745.969.000,00	(10.807.000,00)	(1,43)	
5.1.7.15.16	Gampong Alue Seupeung (APBN)	753.691.000,00	742.884.000,00	(10.807.000,00)	(1,43)	
5.1.7.15.17	Gampong Krueng Itam (APBN)	828.202.000,00	817.395.000,00	(10.807.000,00)	(1,30)	
5.1.7.15.18	Gampong Alue Gajah (APBN)	752.074.000,00	741.267.000,00	(10.807.000,00)	(1,44)	
5.1.7.15.19	Gampong Alue Labu (APBN)	775.906.000,00	765.099.000,00	(10.807.000,00)	(1,39)	
5.1.7.15.20	Gampong Gapa Garu (APBN)	922.841.000,00	912.034.000,00	(10.807.000,00)	(1,17)	
5.1.7.15.21	Gampong Kuala Tadu (APBN)	745.656.000,00	734.849.000,00	(10.807.000,00)	(1,45)	
5.1.7.15.22	Gampong Cot Mee (APBN)	934.561.000,00	923.754.000,00	(10.807.000,00)	(1,16)	
5.1.7.16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Tripa Makmur (Dana Desa dari APBN)	11.004.369.000,00	10.885.492.000,00	(118.877.000,00)	(1,08)	
5.1.7.16.01	Gampong Kuala Tripa (APBN)	1.420.463.000,00	1.409.656.000,00	(10.807.000,00)	(0,76)	
5.1.7.16.02	Gampong Babah Lueng (APBN)	1.410.694.000,00	1.399.887.000,00	(10.807.000,00)	(0,77)	
5.1.7.16.03	Gampong Drieng Tujoh (APBN)	886.692.000,00	875.885.000,00	(10.807.000,00)	(1,22)	
5.1.7.16.04	Gampong Lueng Keubeu Jagat (APBN)	888.157.000,00	877.350.000,00	(10.807.000,00)	(1,22)	
5.1.7.16.05	Gampong Kabu (APBN)	1.350.594.000,00	1.339.787.000,00	(10.807.000,00)	(0,80)	
5.1.7.16.06	Gampong Pasie Keubeu Dom (APBN)	930.626.000,00	919.819.000,00	(10.807.000,00)	(1,16)	
5.1.7.16.07	Gampong Neubok Yee PK (APBN)	775.421.000,00	764.614.000,00	(10.807.000,00)	(1,39)	
5.1.7.16.08	Gampong Neubok Yee PP (APBN)	815.064.000,00	804.257.000,00	(10.807.000,00)	(1,33)	
5.1.7.16.09	Gampong Mon Dua (APBN)	910.566.000,00	899.759.000,00	(10.807.000,00)	(1,19)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.16.10	Gampong Ujong Krueng (APBN)	789.533.000,00	778.726.000,00	(10.807.000,00)	(1,37)	
5.1.7.16.11	Gampong Panton Pange (APBN)	826.559.000,00	815.752.000,00	(10.807.000,00)	(1,31)	
5.1.7.17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang (Dana Desa dari APBN)	3.247.600.000,00	3.204.369.000,00	(43.231.000,00)	(1,33)	
5.1.7.17.01	Gampong Blang Puuk (APBN)	794.599.000,00	783.792.000,00	(10.807.000,00)	(1,36)	
5.1.7.17.02	Gampong Babah Suak (APBN)	747.298.000,00	736.491.000,00	(10.807.000,00)	(1,45)	
5.1.7.17.03	Gampong Kuta Teungoh (APBN)	833.973.000,00	823.166.000,00	(10.807.000,00)	(1,30)	
5.1.7.17.04	Gampong Blang Meurandeh (APBN)	871.730.000,00	860.920.000,00	(10.810.000,00)	(1,24)	
5.1.7.18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Kuala (Alokasi Dana Desa dari APBK)	6.820.850.040,00	6.978.695.469,00	157.845.429,00	2,31	
5.1.7.18.01	Gampong Lawa Batu (APBK)	382.832.570,00	392.862.597,00	10.030.027,00	2,62	
5.1.7.18.02	Gampong Jogja (APBK)	389.655.820,00	396.006.480,00	6.350.660,00	1,63	
5.1.7.18.03	Gampong Ujong Sikuneng (APBK)	387.619.820,00	393.782.883,00	6.163.063,00	1,59	
5.1.7.18.04	Gampong Blang Muko (APBK)	415.329.470,00	423.307.933,00	7.978.463,00	1,92	
5.1.7.18.05	Gampong Pulo Ie (APBK)	378.553.070,00	386.326.123,00	7.773.053,00	2,05	
5.1.7.18.06	Gampong Purworejo (APBK)	377.282.820,00	383.963.916,00	6.681.096,00	1,77	
5.1.7.18.07	Gampong Blang Baro (APBK)	377.525.070,00	384.775.740,00	7.250.670,00	1,92	
5.1.7.18.08	Gampong Alue Ie Mameh (APBK)	400.692.720,00	406.805.121,00	6.112.401,00	1,53	
5.1.7.18.09	Gampong Ujong Pasi (APBK)	391.631.070,00	399.506.258,00	7.875.188,00	2,01	
5.1.7.18.10	Gampong Simpang Peut (APBK)	462.483.370,00	485.422.754,00	22.939.384,00	4,96	
5.1.7.18.11	Gampong Blang Teungoh (APBK)	376.520.070,00	394.453.316,00	17.933.246,00	4,76	
5.1.7.18.12	Gampong Gunong Reubo (APBK)	365.054.170,00	372.005.122,00	6.950.952,00	1,90	
5.1.7.18.13	Gampong Cot Kumbang (APBK)	379.901.320,00	412.066.386,00	32.165.066,00	8,47	
5.1.7.18.14	Gampong Blang Bintang (APBK)	390.760.070,00	397.846.989,00	7.086.919,00	1,81	
5.1.7.18.15	Gampong Ujong Patihah (APBK)	541.872.320,00	544.420.903,00	2.548.583,00	0,47	
5.1.7.18.16	Gampong Kuta Makmue (APBK)	390.713.070,00	386.179.366,00	(4.533.704,00)	(1,16)	
5.1.7.18.17	Gampong Ujong Padang (APBK)	412.423.220,00	418.963.582,00	6.540.362,00	1,59	
5.1.7.19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Seunagan Timur (Alokasi Dana Desa dari APBK)	11.157.542.880,00	11.367.538.234,00	209.995.354,00	1,88	
5.1.7.19.01	Gampong Blang Panyang (APBK)	350.488.920,00	355.741.263,00	5.252.343,00	1,50	
5.1.7.19.02	Gampong Meugat Meh (APBK)	339.165.670,00	344.583.089,00	5.417.419,00	1,60	
5.1.7.19.03	Gampong Lhok Pange (APBK)	339.045.420,00	344.583.928,00	5.538.508,00	1,63	
5.1.7.19.04	Gampong Blang Lango (APBK)	290.366.120,00	320.738.480,00	30.372.360,00	10,46	
5.1.7.19.05	Gampong Tuwi Meuleusong (APBK)	292.938.870,00	300.708.492,00	7.769.622,00	2,65	
5.1.7.19.06	Gampong Blang Geudong (APBK)	314.379.270,00	320.142.764,00	5.763.494,00	1,83	
5.1.7.19.07	Gampong Blang Teungku (APBK)	313.898.020,00	319.643.486,00	5.745.466,00	1,83	
5.1.7.19.08	Gampong Sawang Mane (APBK)	313.576.770,00	318.981.135,00	5.404.365,00	1,72	
5.1.7.19.09	Gampong Keude Neulop (APBK)	313.653.020,00	318.781.651,00	5.128.631,00	1,64	
5.1.7.19.10	Gampong Kila (APBK)	314.042.020,00	319.620.427,00	5.578.407,00	1,78	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.19.11	Gampong Kandeh (APBK)	344.487.920,00	354.273.495,00	9.785.575,00	2,84	
5.1.7.19.12	Gampong Cot Gud (APBK)	350.365.420,00	355.729.542,00	5.364.122,00	1,53	
5.1.7.19.13	Gampong Kabu Baroh (APBK)	337.330.920,00	342.606.865,00	5.275.945,00	1,56	
5.1.7.19.14	Gampong Kabu Tunong (APBK)	351.730.420,00	357.203.315,00	5.472.895,00	1,56	
5.1.7.19.15	Gampong Keude Linteung (APBK)	349.548.670,00	354.959.002,00	5.410.332,00	1,55	
5.1.7.19.16	Gampong Meurandeh Suak (APBK)	340.717.420,00	347.575.557,00	6.858.137,00	2,01	
5.1.7.19.17	Gampong Uteun Pulo (APBK)	387.040.570,00	392.779.891,00	5.739.321,00	1,48	
5.1.7.19.18	Gampong Cot Manyang (APBK)	313.501.020,00	319.101.873,00	5.600.853,00	1,79	
5.1.7.19.19	Gampong Pulo Teungoh (APBK)	314.266.770,00	319.814.446,00	5.547.676,00	1,77	
5.1.7.19.20	Gampong Cot Di:ul (APBK)	301.075.370,00	294.478.245,00	(6.597.125,00)	(2,19)	
5.1.7.19.21	Gampong Cot Teuku Dek (APBK)	289.344.870,00	294.739.988,00	5.395.118,00	1,86	
5.1.7.19.22	Gampong Sapeng (APBK)	338.607.920,00	343.838.422,00	5.230.502,00	1,54	
5.1.7.19.23	Gampong Peuleukung (APBK)	314.113.270,00	319.221.067,00	5.107.797,00	1,63	
5.1.7.19.24	Gampong Paya (APBK)	325.973.020,00	319.399.394,00	(6.573.626,00)	(2,02)	
5.1.7.19.25	Gampong Blang Preh (APBK)	290.269.120,00	296.002.451,00	5.733.331,00	1,98	
5.1.7.19.26	Gampong Blang Ara Keude (APBK)	349.266.920,00	354.162.711,00	4.895.791,00	1,40	
5.1.7.19.27	Gampong Blang Ara Gampong (APBK)	314.322.270,00	319.867.858,00	5.545.588,00	1,76	
5.1.7.19.28	Gampong Ie Beudoh(APBK)	339.334.670,00	357.369.073,00	18.034.403,00	5,31	
5.1.7.19.29	Gampong Blang Bayu (APBK)	352.718.920,00	359.170.711,00	6.451.791,00	1,83	
5.1.7.19.30	Gampong Mon Bateung (APBK)	364.405.070,00	382.871.417,00	18.466.347,00	5,07	
5.1.7.19.31	Gampong Suak Peureubong (APBK)	327.724.020,00	322.375.551,00	(5.348.469,00)	(1,63)	
5.1.7.19.32	Gampong Krueng Kulu (APBK)	313.611.270,00	318.785.413,00	5.174.143,00	1,65	
5.1.7.19.33	Gampong Cot Punti (APBK)	313.653.020,00	319.041.629,00	5.388.609,00	1,72	
5.1.7.19.34	Gampong Lhok Mesjid (APBK)	352.579.920,00	358.645.603,00	6.065.683,00	1,72	
5.1.7.20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Seunagan (Alokasi Dana Desa dari APBK)	11.427.791.050,00	11.654.480.649,00	226.689.599,00	1,98	
5.1.7.20.01	Gampong Jeuram (APBK)	349.074.670,00	353.852.643,00	4.777.973,00	1,37	
5.1.7.20.02	Gampong Pante Ceureumen (APBK)	314.919.770,00	320.626.198,00	5.706.428,00	1,81	
5.1.7.20.03	Gampong Kuta Baro Jeuram (APBK)	362.598.420,00	367.931.761,00	5.333.341,00	1,47	
5.1.7.20.04	Gampong Parom (APBK)	350.307.420,00	355.690.790,00	5.383.370,00	1,54	
5.1.7.20.05	Gampong Peureulak (APBK)	313.519.270,00	318.850.591,00	5.331.321,00	1,70	
5.1.7.20.06	Gampong Kuta Sayeh (APBK)	313.400.270,00	318.904.790,00	5.504.520,00	1,76	
5.1.7.20.07	Gampong Blang Baro (APBK)	326.733.770,00	332.733.803,00	6.000.033,00	1,84	
5.1.7.20.08	Gampong Padang (APBK)	351.729.920,00	357.371.055,00	5.641.135,00	1,60	
5.1.7.20.09	Gampong Alue Tho (APBK)	351.323.920,00	358.048.465,00	6.724.545,00	1,91	
5.1.7.20.10	Gampong Lhok Parom (APBK)	313.406.770,00	318.741.870,00	5.335.100,00	1,70	
5.1.7.20.11	Gampong Sapek (APBK)	327.226.020,00	333.946.614,00	6.720.594,00	2,05	
5.1.7.20.12	Gampong Alue Dodok (APBK)	313.369.770,00	318.560.175,00	5.190.405,00	1,66	
5.1.7.20.13	Gampong Cot Kumbang (APBK)	313.944.520,00	319.369.587,00	5.425.067,00	1,73	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.20.14	Gampong Kuta Kumbang (APBK)	313.989.520,00	319.782.272,00	5.792.752,00	1,84	
5.1.7.20.15	Gampong Nigan (APBK)	363.127.920,00	368.527.972,00	5.400.052,00	1,49	
5.1.7.20.16	Gampong Cot (APBK)	315.825.770,00	321.929.737,00	6.103.967,00	1,93	
5.1.7.20.17	Gampong Blang Pateuk (APBK)	314.384.520,00	320.254.718,00	5.870.198,00	1,87	
5.1.7.20.18	Gampong Blang Puuk Nigan (APBK)	313.655.270,00	318.645.045,00	4.989.775,00	1,59	
5.1.7.20.19	Gampong Krueng Ceh (APBK)	315.666.020,00	322.409.836,00	6.743.816,00	2,14	
5.1.7.20.20	Gampong Bantan (APBK)	314.711.270,00	320.748.161,00	6.036.891,00	1,92	
5.1.7.20.21	Gampong Cot Lele (APBK)	313.649.020,00	318.883.745,00	5.234.725,00	1,67	
5.1.7.20.22	Gampong Rambong Rayeuk (APBK)	313.703.020,00	319.044.610,00	5.341.590,00	1,70	
5.1.7.20.23	Gampong Paya Udeung (APBK)	314.109.770,00	319.551.216,00	5.441.446,00	1,73	
5.1.7.20.24	Gampong Alue Buloh (APBK)	313.665.020,00	319.231.622,00	5.566.602,00	1,77	
5.1.7.20.25	Gampong Kuta Paya (APBK)	349.353.170,00	354.961.707,00	5.608.537,00	1,61	
5.1.7.20.26	Gampong Krueng Ceuko (APBK)	314.160.520,00	319.725.797,00	5.565.277,00	1,77	
5.1.7.20.27	Gampong Lhok Padang (APBK)	313.860.770,00	319.617.391,00	5.756.621,00	1,83	
5.1.7.20.28	Gampong Kuta Aceh (APBK)	314.366.270,00	319.695.524,00	5.329.254,00	1,70	
5.1.7.20.29	Gampong Krueng Mangkom (APBK)	295.167.120,00	328.563.738,00	33.396.618,00	11,31	
5.1.7.20.30	Gampong Latong (APBK)	364.060.420,00	369.919.871,00	5.859.451,00	1,61	
5.1.7.20.31	Gampong Paya Undan (APBK)	349.863.670,00	355.633.519,00	5.769.849,00	1,65	
5.1.7.20.32	Gampong Blang Puuk Kulu (APBK)	325.342.770,00	330.904.780,00	5.562.010,00	1,71	
5.1.7.20.33	Gampong Blang Murong (APBK)	328.754.770,00	335.810.977,00	7.056.207,00	2,15	
5.1.7.20.34	Gampong Kulu (APBK)	350.792.670,00	356.187.206,00	5.394.536,00	1,54	
5.1.7.20.35	Gampong Rambong Cut (APBK)	314.027.270,00	319.822.863,00	5.795.593,00	1,85	
5.1.7.21	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Beutong (Alokasi Dana Desa dari APBK)	8.085.830.130,00	8.286.304.413,00	200.474.283,00	2,48	
5.1.7.21.01	Gampong Blang Seunong (APBK)	318.437.270,00	327.302.649,00	8.865.379,00	2,78	
5.1.7.21.02	Gampong Pante Ara (APBK)	319.183.770,00	339.598.502,00	20.414.732,00	6,40	
5.1.7.21.03	Gampong Gunong Nagan (APBK)	291.044.870,00	297.877.527,00	6.832.657,00	2,35	
5.1.7.21.04	Gampong Tuwi Bunta (APBK)	290.928.370,00	297.647.347,00	6.718.977,00	2,31	
5.1.7.21.05	Gampong Blang Mesjid (APBK)	329.317.270,00	337.225.541,00	7.908.271,00	2,40	
5.1.7.21.06	Gampong Blang Neuang (APBK)	291.878.370,00	299.180.725,00	7.302.355,00	2,50	
5.1.7.21.07	Gampong Panton Bayam (APBK)	317.769.520,00	325.612.968,00	7.843.448,00	2,47	
5.1.7.21.08	Gampong Blang Baro P. Raga (APBK)	289.335.370,00	294.795.947,00	5.460.577,00	1,89	
5.1.7.21.09	Gampong Krueng Cut (APBK)	290.299.620,00	296.452.999,00	6.153.379,00	2,12	
5.1.7.21.10	Gampong Blang Leumak (APBK)	315.559.770,00	321.785.341,00	6.225.571,00	1,97	
5.1.7.21.11	Gampong Babah Krueng (APBK)	378.995.070,00	386.793.461,00	7.798.391,00	2,06	
5.1.7.21.12	Gampong Blang Seumot (APBK)	368.028.420,00	376.856.263,00	8.827.843,00	2,40	
5.1.7.21.13	Gampong Lhok Seumot (APBK)	393.078.320,00	402.501.992,00	9.423.672,00	2,40	
5.1.7.21.14	Gampong Meunasah Pante (APBK)	375.111.570,00	381.551.734,00	6.440.164,00	1,72	
5.1.7.21.15	Gampong Kuta Jeumpa (APBK)	315.139.270,00	321.588.900,00	6.449.630,00	2,05	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 21 . 16	Gampong Blang Dalam (APBK)	317.982.770,00	326.176.092,00	8.193.322,00	2,58	
5 . 1 . 7 . 21 . 17	Gampong Keude Seumot (APBK)	388.581.570,00	394.332.519,00	5.750.949,00	1,48	
5 . 1 . 7 . 21 . 18	Gampong Blang Baro Rambong (APBK)	424.567.220,00	438.017.742,00	13.450.522,00	3,17	
5 . 1 . 7 . 21 . 19	Gampong Ujong Blang (APBK)	317.546.020,00	325.501.244,00	7.955.224,00	2,51	
5 . 1 . 7 . 21 . 20	Gampong Meunasah Krueng (APBK)	354.371.420,00	362.281.297,00	7.909.877,00	2,23	
5 . 1 . 7 . 21 . 21	Gampong Meunasah Dayah (APBK)	351.797.670,00	358.339.376,00	6.541.706,00	1,86	
5 . 1 . 7 . 21 . 22	Gampong Meunasah Tengoh (APBK)	367.649.420,00	375.665.433,00	8.016.013,00	2,18	
5 . 1 . 7 . 21 . 23	Gampong Kulam Jemeh (APBK)	360.132.670,00	371.722.863,00	11.590.193,00	3,22	
5 . 1 . 7 . 21 . 24	Gampong Bumi Sari (APBK)	319.094.520,00	327.495.951,00	8.401.431,00	2,63	
5 . 1 . 7 . 22	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Darul Makmur (Alokasi Dana Desa dari APBK)	14.512.128.275,00	15.018.272.110,00	506.143.835,00	3,49	
5 . 1 . 7 . 22 . 01	Gampong Lamie (APBK)	397.551.320,00	408.812.136,00	11.260.816,00	2,83	
5 . 1 . 7 . 22 . 02	Gampong Kuta Trieng (APBK)	370.525.420,00	380.416.343,00	9.890.923,00	2,67	
5 . 1 . 7 . 22 . 03	Gampong Gelanggang Gajah (APBK)	321.188.270,00	331.810.739,00	10.622.469,00	3,31	
5 . 1 . 7 . 22 . 04	Gampong Kayee Unoe (APBK)	292.434.370,00	299.665.662,00	7.231.292,00	2,47	
5 . 1 . 7 . 22 . 05	Gampong Blang Baro (APBK)	354.142.670,00	361.730.748,00	7.588.078,00	2,14	
5 . 1 . 7 . 22 . 06	Gampong Alue Bilie (APBK)	412.900.970,00	419.262.174,00	6.361.204,00	1,54	
5 . 1 . 7 . 22 . 07	Gampong Suka Raja (APBK)	353.567.920,00	360.040.773,00	6.472.853,00	1,83	
5 . 1 . 7 . 22 . 08	Gampong Gunong Cut (APBK)	399.219.320,00	412.092.866,00	12.873.546,00	3,22	
5 . 1 . 7 . 22 . 09	Gampong Suka Jadi (APBK)	290.413.620,00	321.003.661,00	30.590.041,00	10,53	
5 . 1 . 7 . 22 . 10	Gampong Tuwi Buya (APBK)	318.999.520,00	327.095.730,00	8.096.210,00	2,54	
5 . 1 . 7 . 22 . 11	Gampong Ujong Lamie (APBK)	352.501.270,00	366.010.425,00	13.509.155,00	3,83	
5 . 1 . 7 . 22 . 12	Gampong Suak Palembang (APBK)	359.583.920,00	370.225.800,00	10.641.880,00	2,96	
5 . 1 . 7 . 22 . 13	Gampong Alue Waki (APBK)	387.603.895,00	456.365.854,00	68.761.959,00	17,74	
5 . 1 . 7 . 22 . 14	Gampong Alue Geutah (APBK)	354.446.170,00	362.025.201,00	7.579.031,00	2,14	
5 . 1 . 7 . 22 . 15	Gampong Krueng Alem (APBK)	446.109.470,00	476.777.643,00	30.668.173,00	6,87	
5 . 1 . 7 . 22 . 16	Gampong Alue Rambot (APBK)	350.348.520,00	362.657.190,00	12.308.670,00	3,51	
5 . 1 . 7 . 22 . 17	Gampong Krueng Seumayam (APBK)	378.074.170,00	417.214.019,00	39.139.849,00	10,35	
5 . 1 . 7 . 22 . 18	Gampong Pulo Teungoh (APBK)	470.991.120,00	426.501.714,00	(44.489.406,00)	(9,45)	
5 . 1 . 7 . 22 . 19	Gampong Karang Anyer (APBK)	461.082.120,00	460.297.448,00	(784.672,00)	(0,17)	
5 . 1 . 7 . 22 . 20	Gampong Kuala Seumayam (APBK)	320.829.270,00	330.532.671,00	9.703.401,00	3,02	
5 . 1 . 7 . 22 . 21	Gampong Pulo Ie (APBK)	330.523.520,00	338.092.847,00	7.569.327,00	2,29	
5 . 1 . 7 . 22 . 22	Gampong Pulo Kruet (APBK)	294.871.870,00	302.791.778,00	7.919.908,00	2,69	
5 . 1 . 7 . 22 . 23	Gampong Alue Kuyun (APBK)	292.520.120,00	299.458.844,00	6.938.724,00	2,37	
5 . 1 . 7 . 22 . 24	Gampong Alue Raya (APBK)	449.977.470,00	482.792.112,00	32.814.642,00	7,29	
5 . 1 . 7 . 22 . 25	Gampong Alue Jampak (APBK)	343.059.670,00	351.037.691,00	7.978.021,00	2,33	
5 . 1 . 7 . 22 . 26	Gampong Suka Mulia (APBK)	376.621.070,00	382.947.157,00	6.326.087,00	1,68	
5 . 1 . 7 . 22 . 27	Gampong Simpang Dua (APBK)	317.837.520,00	325.323.131,00	7.485.611,00	2,36	
5 . 1 . 7 . 22 . 28	Gampong Sido Jadi (APBK)	339.789.670,00	346.424.272,00	6.634.602,00	1,95	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.22.29	Gampong Serba Jadi (APBK)	415.469.070,00	416.321.688,00	852.618,00	0,21	
5.1.7.22.30	Gampong Serba Guna (APBK)	399.191.820,00	409.989.602,00	10.797.782,00	2,70	
5.1.7.22.31	Gampong SP. Deli Klang (APBK)	399.435.970,00	429.603.802,00	30.167.832,00	7,55	
5.1.7.22.32	Gampong Panton Bayu (APBK)	393.928.070,00	403.097.281,00	9.169.211,00	2,33	
5.1.7.22.33	Gampong Ujong Tanjong (APBK)	336.340.520,00	372.044.785,00	35.704.265,00	10,62	
5.1.7.22.34	Gampong Suka Ramai (APBK)	405.265.720,00	412.446.056,00	7.180.336,00	1,77	
5.1.7.22.35	Gampong Ladang Baro (APBK)	292.494.620,00	299.436.197,00	6.941.577,00	2,37	
5.1.7.22.36	Gampong Alue Bateung Broek (APBK)	375.826.420,00	389.128.488,00	13.302.068,00	3,54	
5.1.7.22.37	Gampong SP. Deli Kampong (APBK)	361.211.670,00	373.330.832,00	12.119.162,00	3,36	
5.1.7.22.38	Gampong Blang Luah (APBK)	378.753.670,00	391.955.729,00	13.202.059,00	3,49	
5.1.7.22.39	Gampong Sumber Makmur (APBK)	293.002.620,00	300.222.199,00	7.219.579,00	2,46	
5.1.7.22.40	Gampong Makarti Jaya (APBK)	323.493.870,00	341.288.822,00	17.794.952,00	5,50	
5.1.7.23	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Suka Makmue (Alokasi Dana Desa dari APBK)	6.230.303.480,00	6.253.635.597,00	23.332.117,00	0,37	
5.1.7.23.01	Gampong Lueng Baro (APBK)	415.619.220,00	422.877.812,00	7.258.592,00	1,75	
5.1.7.23.02	Gampong Alue Kambuk (APBK)	326.565.770,00	320.398.754,00	(6.167.016,00)	(1,89)	
5.1.7.23.03	Gampong Kuta Padang (APBK)	338.340.520,00	332.027.989,00	(6.312.531,00)	(1,87)	
5.1.7.23.04	Gampong Suak Bilie (APBK)	365.225.420,00	372.363.957,00	7.138.537,00	1,95	
5.1.7.23.05	Gampong Macah (APBK)	327.919.270,00	323.911.350,00	(4.007.920,00)	(1,22)	
5.1.7.23.06	Gampong Seumambek (APBK)	289.647.870,00	295.679.985,00	6.032.115,00	2,08	
5.1.7.23.07	Gampong Cot Kuta (APBK)	366.126.670,00	361.388.968,00	(4.737.702,00)	(1,29)	
5.1.7.23.08	Gampong Kabu Blang Sapek (APBK)	338.439.020,00	332.000.661,00	(6.438.359,00)	(1,90)	
5.1.7.23.09	Gampong Cot Peuradi (APBK)	338.778.770,00	332.324.792,00	(6.453.978,00)	(1,91)	
5.1.7.23.10	Gampong Blang Sapek (APBK)	364.033.170,00	382.280.524,00	18.247.354,00	5,01	
5.1.7.23.11	Gampong Lhok Beutong (APBK)	289.149.870,00	294.555.930,00	5.406.060,00	1,87	
5.1.7.23.12	Gampong Teungoh (APBK)	301.747.870,00	295.488.373,00	(6.259.497,00)	(2,07)	
5.1.7.23.13	Gampong Lhok Rameuang (APBK)	302.900.870,00	297.102.215,00	(5.798.655,00)	(1,91)	
5.1.7.23.14	Gampong Blang Muling (APBK)	328.059.020,00	322.461.190,00	(5.597.830,00)	(1,71)	
5.1.7.23.15	Gampong Krak Tampai (APBK)	341.256.270,00	336.180.536,00	(5.075.734,00)	(1,49)	
5.1.7.23.16	Gampong Meureubo (APBK)	301.317.120,00	319.491.949,00	18.174.829,00	6,03	
5.1.7.23.17	Gampong Kuta Baroe Blang Muling (APBK)	314.145.770,00	319.900.011,00	5.754.241,00	1,83	
5.1.7.23.18	Gampong Alue Peusaja (APBK)	291.918.620,00	298.693.793,00	6.775.173,00	2,32	
5.1.7.23.19	Gampong Alue Gajah (APBK)	289.112.370,00	294.506.808,00	5.394.438,00	1,87	
5.1.7.24	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Kuala Pesisir (Alokasi Dana Desa dari APBK)	6.199.201.720,00	6.299.459.452,00	100.257.732,00	1,62	
5.1.7.24.01	Gampong Suak Puntong (APBK)	401.347.470,00	408.004.643,00	6.657.173,00	1,66	
5.1.7.24.02	Gampong Lhok (APBK)	338.813.170,00	344.787.175,00	5.974.005,00	1,76	
5.1.7.24.03	Gampong Kuala Baro (APBK)	377.098.070,00	384.540.740,00	7.442.670,00	1,97	
5.1.7.24.04	Gampong Padang Rubek (APBK)	416.905.970,00	425.401.575,00	8.495.605,00	2,04	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.24.05	Gampong Pulo (APBK)	338.442.170,00	344.009.367,00	5.567.197,00	1,64	
5.1.7.24.06	Gampong Langkak (APBK)	419.039.220,00	429.193.859,00	10.154.639,00	2,42	
5.1.7.24.07	Gampong Kuala Tuha (APBK)	375.568.070,00	381.869.149,00	6.301.079,00	1,68	
5.1.7.24.08	Gampong Kubang Gajah (APBK)	388.382.820,00	394.342.983,00	5.960.163,00	1,53	
5.1.7.24.09	Gampong Kuala Trang (APBK)	466.887.020,00	474.343.203,00	7.456.183,00	1,60	
5.1.7.24.10	Gampong Cot Rambong (APBK)	352.359.920,00	347.367.773,00	(4.992.147,00)	(1,42)	
5.1.7.24.11	Gampong Padang Panyang (APBK)	414.788.970,00	422.395.659,00	7.606.689,00	1,83	
5.1.7.24.12	Gampong Arongan (APBK)	375.534.820,00	381.251.890,00	5.717.070,00	1,52	
5.1.7.24.13	Gampong Jati Rejo (APBK)	379.220.570,00	386.914.538,00	7.693.968,00	2,03	
5.1.7.24.14	Gampong Purwodadi (APBK)	414.988.970,00	422.210.224,00	7.221.254,00	1,74	
5.1.7.24.15	Gampong Lueng Teuku Ben (APBK)	374.670.070,00	380.868.119,00	6.198.049,00	1,65	
5.1.7.24.16	Gampong Purwosari (APBK)	365.154.420,00	371.958.555,00	6.804.135,00	1,86	
5.1.7.25	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Tadu Raya (Alokasi Dana Desa dari APBK)	7.686.624.940,00	7.860.810.742,00	174.185.802,00	2,27	
5.1.7.25.01	Gampong Alue Bata (APBK)	395.112.070,00	404.062.627,00	8.950.557,00	2,27	
5.1.7.25.02	Gampong Gunong Sapek (APBK)	291.544.870,00	298.402.098,00	6.857.228,00	2,35	
5.1.7.25.03	Gampong Sarah Mantok (APBK)	291.388.620,00	298.239.326,00	6.850.706,00	2,35	
5.1.7.25.04	Gampong Pasie Luah (APBK)	291.001.370,00	297.450.431,00	6.449.061,00	2,22	
5.1.7.25.05	Gampong Gunong Geulugo (APBK)	316.520.020,00	323.706.367,00	7.186.347,00	2,27	
5.1.7.25.06	Gampong Gunong Keupok (APBK)	315.368.020,00	321.825.533,00	6.457.513,00	2,05	
5.1.7.25.07	Gampong Gunong Pungki (APBK)	420.345.970,00	429.812.716,00	9.466.746,00	2,25	
5.1.7.25.08	Gampong Alue Siron (APBK)	345.236.920,00	354.758.512,00	9.521.592,00	2,76	
5.1.7.25.09	Gampong Cot Mue (APBK)	343.663.170,00	352.683.378,00	9.020.208,00	2,62	
5.1.7.25.10	Gampong Babah Rot (APBK)	331.083.020,00	338.745.350,00	7.662.330,00	2,31	
5.1.7.25.11	Gampong Babah Dua (APBK)	394.408.570,00	404.022.450,00	9.613.880,00	2,44	
5.1.7.25.12	Gampong Batu Raja (APBK)	401.831.220,00	409.316.932,00	7.485.712,00	1,86	
5.1.7.25.13	Gampong Simpang Jaya (APBK)	339.540.670,00	345.544.350,00	6.003.680,00	1,77	
5.1.7.25.14	Gampong Sumber Daya (APBK)	378.300.820,00	385.578.527,00	7.277.707,00	1,92	
5.1.7.25.15	Gampong Ranto Selamat (APBK)	414.528.220,00	421.557.073,00	7.028.853,00	1,70	
5.1.7.25.16	Gampong Alue Seupeung (APBK)	316.812.770,00	323.737.608,00	6.924.838,00	2,19	
5.1.7.25.17	Gampong Krueng Itam (APBK)	419.909.220,00	429.346.534,00	9.437.314,00	2,25	
5.1.7.25.18	Gampong Alue Gajah (APBK)	291.605.370,00	298.475.694,00	6.870.324,00	2,36	
5.1.7.25.19	Gampong Alue Labu (APBK)	292.416.370,00	300.090.297,00	7.673.927,00	2,62	
5.1.7.25.20	Gampong Gapa Garu (APBK)	300.719.870,00	313.348.398,00	12.628.528,00	4,20	
5.1.7.25.21	Gampong Kuala Tadu (APBK)	377.072.070,00	383.725.987,00	6.653.917,00	1,76	
5.1.7.25.22	Gampong Cot Mee (APBK)	418.215.720,00	426.380.554,00	8.164.834,00	1,95	
5.1.7.26	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Tripa Makmur (Alokasi Dana Desa dari APBK)	3.819.476.470,00	3.950.409.132,00	130.932.662,00	3,43	
5.1.7.26.01	Gampong Kuala Tripa (APBK)	405.898.820,00	423.057.673,00	17.158.853,00	4,23	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.26.02	Gampong Babah Lueng (APBK)	344.364.770,00	361.194.216,00	16.829.446,00	4,89	
5.1.7.26.03	Gampong Drien Tujoh (APBK)	384.873.320,00	396.282.921,00	11.409.601,00	2,96	
5.1.7.26.04	Gampong Lueng Keubeu Jagat (APBK)	376.218.670,00	387.677.659,00	11.458.989,00	3,05	
5.1.7.26.05	Gampong Kabu (APBK)	357.023.770,00	371.826.658,00	14.802.888,00	4,15	
5.1.7.26.06	Gampong Pasie Keubeu Dom (APBK)	337.864.270,00	350.755.286,00	12.891.016,00	3,82	
5.1.7.26.07	Gampong Neubok Yee PK (APBK)	317.480.020,00	325.137.606,00	7.657.586,00	2,41	
5.1.7.26.08	Gampong Neubok Yee PP (APBK)	320.123.020,00	329.117.354,00	8.994.334,00	2,81	
5.1.7.26.09	Gampong Mon Dua (APBK)	336.879.520,00	349.094.136,00	12.214.616,00	3,63	
5.1.7.26.10	Gampong Ujong Krueng (APBK)	318.266.020,00	326.399.434,00	8.133.414,00	2,56	
5.1.7.26.11	Gampong Panton Pange (APBK)	320.484.270,00	329.866.189,00	9.381.919,00	2,93	
5.1.7.27	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kec. Beutong Ateuh Banggalang (Alokasi Dana Desa dari APBK)	1.294.195.080,00	1.341.745.627,00	47.550.547,00	3,67	
5.1.7.27.01	Gampong Blang Puuk (APBK)	356.145.420,00	364.449.680,00	8.304.260,00	2,33	
5.1.7.27.02	Gampong Babah Suak (APBK)	317.221.770,00	323.931.037,00	6.709.267,00	2,12	
5.1.7.27.03	Gampong Kuta Teungoh (APBK)	321.926.770,00	343.558.709,00	21.631.939,00	6,72	
5.1.7.27.04	Gampong Blang Meurandeh (APBK)	298.901.120,00	309.806.201,00	10.905.081,00	3,65	
5.1.8	**Belanja Tidak Terduga**	1.500.000.000,00	25.317.200.000,00	23.817.200.000,00	1.587,81	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	25.317.200.000,00	23.817.200.000,00	1.587,81	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	25.317.200.000,00	23.817.200.000,00	1.587,81	
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	657.410.615.538,74	465.855.906.843,00	(191.554.708.695,74)	(29,14)	
5.2.1	**Belanja Pegawai**	44.220.784.059,00	34.299.949.559,00	(9.920.834.500,00)	(22,43)	
5.2.1.01	Honorarium PNS	12.802.076.059,00	8.142.483.559,00	(4.659.592.500,00)	(36,40)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.720.026.059,00	8.074.683.559,00	(4.645.342.500,00)	(36,52)	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	82.050.000,00	67.800.000,00	(14.250.000,00)	(17,37)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.699.370.500,00	5.748.657.500,00	(950.713.000,00)	(14,19)	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.673.070.500,00	5.735.657.500,00	(937.413.000,00)	(14,05)	
5.2.1.02.05	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	26.300.000,00	13.000.000,00	(13.300.000,00)	(50,57)	
5.2.1.03	Uang Lembur	4.846.994.500,00	1.902.308.500,00	(2.944.686.000,00)	(60,75)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.846.994.500,00	1.902.308.500,00	(2.944.686.000,00)	(60,75)	
5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	1.100.843.000,00	0,00	(1.100.843.000,00)	(100,00)	
5.2.1.04.01	Honorarium Pengelola Dana BOS	1.100.843.000,00	0,00	(1.100.843.000,00)	(100,00)	
5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.431.500.000,00	7.166.500.000,00	(265.000.000,00)	(3,57)	
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	7.228.000.000,00	7.075.000.000,00	(153.000.000,00)	(2,12)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	203.500.000,00	91.500.000,00	(112.000.000,00)	(55,04)	
5.2.1.06	Honorarium Pegawai BLUD	11.340.000.000,00	11.340.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.06.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BLUD	11.340.000.000,00	11.340.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	265.599.883.534,70	177.213.640.532,00	(88.386.243.002,70)	(33,28)	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.995.690.808,20	11.626.541.593,00	(4.369.149.215,20)	(27,31)	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.887.006.430,70	1.991.793.494,00	(2.895.212.936,70)	(59,24)	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	20.285.200,00	20.285.200,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	736.547.514,00	462.325.500,00	(274.222.014,00)	(37,23)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	326.876.000,00	98.207.500,00	(228.668.500,00)	(69,96)	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.169.287.140,00	440.145.300,00	(729.141.840,00)	(62,36)	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	941.194.000,00	575.524.000,00	(365.670.000,00)	(38,85)	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	38.592.500,00	13.387.500,00	(25.205.000,00)	(65,31)	
5.2.2.01.09	Belanja Cartride Komputer	64.590.000,00	35.100.000,00	(29.490.000,00)	(45,66)	
5.2.2.01.11	Belanja Kebutuhan Sandang Pangan	1.479.425.380,00	2.948.235.380,00	1.468.810.000,00	99,28	
5.2.2.01.12	Belanja Tinta Infus/Suntik	107.948.300,00	2.880.000,00	(105.068.300,00)	(97,33)	
5.2.2.01.14	Belanja Bahan Pakai Habis lainnya	5.696.074.811,00	4.901.397.719,00	(794.677.092,00)	(13,95)	
5.2.2.01.15	Belanja barang Pecah Belah	55.000.000,00	12.000.000,00	(43.000.000,00)	(78,18)	
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga dan Lainnya	472.863.532,50	125.260.000,00	(347.603.532,50)	(73,51)	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.499.382.725,50	11.473.206.800,00	(1.026.175.925,50)	(8,21)	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	707.437.000,00	187.737.000,00	(519.700.000,00)	(73,46)	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.565.705.600,00	278.139.600,00	(2.287.566.000,00)	(89,16)	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	436.800.000,00	171.300.000,00	(265.500.000,00)	(60,78)	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.600.464.000,00	1.541.395.000,00	(1.059.069.000,00)	(40,73)	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	560.450.000,00	171.050.000,00	(389.400.000,00)	(69,48)	
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Kelengkapan Kesehatan	77.575.000,00	6.005.686.250,00	5.928.111.250,00	7.641,78	
5.2.2.02.07	Belanja Dekorasi	449.783.000,00	187.837.000,00	(261.946.000,00)	(58,24)	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan-bahan Laboratorium	132.752.000,00	95.652.000,00	(37.100.000,00)	(27,95)	
5.2.2.02.09	Belanja Hadiah/Trofi	1.762.282.500,00	568.542.000,00	(1.193.740.500,00)	(67,74)	
5.2.2.02.10	Belanja Pakan Ternak/Ikan	359.870.500,00	344.545.500,00	(15.325.000,00)	(4,26)	
5.2.2.02.11	Belanja Perlengkapan Olah Raga	592.623.413,50	224.053.200,00	(368.570.213,50)	(62,19)	
5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Pertukangan	8.400.000,00	5.000.000,00	(3.400.000,00)	(40,48)	
5.2.2.02.13	Belanja Bahan Kelengkapan Pameran	124.800.000,00	87.050.000,00	(37.750.000,00)	(30,25)	
5.2.2.02.16	Belanja bahan Bersubsidi	228.500.000,00	228.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.17	Belanja Perlengkapan Peserta	1.700.144.712,00	1.278.509.250,00	(421.635.462,00)	(24,80)	
5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Bahan Baku dan Peralatan Pelatihan	68.060.000,00	30.560.000,00	(37.500.000,00)	(55,10)	
5.2.2.02.21	Belanja Pupuk	86.235.000,00	48.900.000,00	(37.335.000,00)	(43,29)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.02.22	Belanja Bahan Bacaan	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
5.2.2.02.23	Belanja Souvenir	29.500.000,00	14.750.000,00	(14.750.000,00)	(50,00)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.381.780.203,00	84.644.374.493,00	(21.737.405.710,00)	(20,43)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	181.420.000,00	152.520.000,00	(28.900.000,00)	(15,93)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	18.302.000,00	16.856.000,00	(1.446.000,00)	(7,90)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.809.075.995,00	8.542.826.823,00	(2.266.249.172,00)	(20,97)	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	312.625.000,00	268.505.000,00	(44.120.000,00)	(14,11)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.963.304.586,00	1.424.910.586,00	(538.394.000,00)	(27,42)	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	29.657.000,00	18.296.000,00	(11.361.000,00)	(38,31)	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	64.220.000,00	25.920.000,00	(38.300.000,00)	(59,64)	
5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.741.047.492,00	9.538.413.284,00	(7.202.634.208,00)	(43,02)	
5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan	1.132.094.190,00	396.462.500,00	(735.631.690,00)	(64,98)	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Media Masa/Publikasi/Iklan	148.225.000,00	95.625.000,00	(52.600.000,00)	(35,49)	
5.2.2.03.16	Belanja Operasional	10.533.957.000,00	10.506.207.000,00	(27.750.000,00)	(0,26)	
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.607.214.300,00	5.846.368.300,00	(760.846.000,00)	(11,52)	
5.2.2.03.27	Belanja Komunikasi dan Informasi	48.829.000,00	32.909.000,00	(15.920.000,00)	(32,60)	
5.2.2.03.30	Belanja Pengobatan dan Perawatan Kesehatan KDH/ WKDH	177.310.000,00	116.810.000,00	(60.500.000,00)	(34,12)	
5.2.2.03.33	Belanja Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	12.036.078.640,00	6.201.555.000,00	(5.834.523.640,00)	(48,48)	
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Pemindahan Barang/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.35	Belanja Jasa Petugas Administrasi Perkantoran	45.229.920.000,00	41.131.690.000,00	(4.098.230.000,00)	(9,06)	
5.2.2.03.36	Belanja Jasa Pengamanan Acara	348.000.000,00	328.000.000,00	(20.000.000,00)	(5,75)	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.830.981.818,00	4.687.749.338,00	(2.143.232.480,00)	(31,38)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	961.126.000,00	682.692.000,00	(278.434.000,00)	(28,97)	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.993.788.600,00	1.435.707.460,00	(558.081.140,00)	(27,99)	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.889.337.018,00	1.996.267.778,00	(893.069.240,00)	(30,91)	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	385.020.000,00	345.335.000,00	(39.685.000,00)	(10,31)	
5.2.2.05.07	Belanja Rehabilitasi Kendaraan Bermotor Roda 4	506.599.400,00	166.580.500,00	(340.018.900,00)	(67,12)	
5.2.2.05.08	Belanja Doorsmer	95.110.800,00	61.166.600,00	(33.944.200,00)	(35,69)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.687.956.798,00	3.619.872.403,00	(4.068.084.395,00)	(52,92)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.817.221.263,00	2.411.933.785,00	(2.405.287.478,00)	(49,93)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.695.260.535,00	1.047.263.618,00	(1.647.996.917,00)	(61,14)	
5.2.2.06.03	Belanja Cetak Pin/Plakat/Lencana/Piagam/Papan Nama	175.475.000,00	160.675.000,00	(14.800.000,00)	(8,43)	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	739.970.000,00	434.700.000,00	(305.270.000,00)	(41,25)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	430.120.000,00	253.500.000,00	(176.620.000,00)	(41,06)	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	128.250.000,00	104.600.000,00	(23.650.000,00)	(18,44)	
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Perlengkapan Acara Khusus	170.000.000,00	65.000.000,00	(105.000.000,00)	(61,76)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	394.234.000,00	149.700.000,00	(244.534.000,00)	(62,03)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	394.234.000,00	149.700.000,00	(244.534.000,00)	(62,03)	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	543.987.500,00	320.291.000,00	(223.696.500,00)	(41,12)	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	84.529.000,00	52.650.000,00	(31.879.000,00)	(37,71)	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	5.200.000,00	4.200.000,00	(1.000.000,00)	(19,23)	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	205.041.000,00	146.291.000,00	(58.750.000,00)	(28,65)	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	73.000.000,00	26.250.000,00	(46.750.000,00)	(64,04)	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	164.417.500,00	84.100.000,00	(80.317.500,00)	(48,85)	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan Tradisional	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.558.993.150,00	11.061.112.746,00	(4.497.880.404,00)	(28,91)	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	921.691.500,00	98.900.000,00	(822.791.500,00)	(89,27)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.577.055.700,00	921.223.500,00	(655.832.200,00)	(41,59)	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.159.199.300,00	1.763.976.000,00	(1.395.223.300,00)	(44,16)	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	8.502.822.400,00	7.264.478.996,00	(1.238.343.404,00)	(14,56)	
5.2.2.11.05	Belanja air minum isi ulang	41.734.250,00	31.034.250,00	(10.700.000,00)	(25,64)	
5.2.2.11.07	Belanja makanan dan minuman lembur	304.940.000,00	164.950.000,00	(139.990.000,00)	(45,91)	
5.2.2.11.08	Belanja makanan dan minuman rumah tangga	910.000.000,00	675.000.000,00	(235.000.000,00)	(25,82)	
5.2.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	141.550.000,00	141.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	843.370.000,00	527.570.000,00	(315.800.000,00)	(37,45)	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	255.000.000,00	127.500.000,00	(127.500.000,00)	(50,00)	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	448.370.000,00	400.070.000,00	(48.300.000,00)	(10,77)	
5.2.2.12.07	Pakaian dinas kepala daerah/ wakil kepala daerah	140.000.000,00	0,00	(140.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	310.901.500,00	674.201.500,00	363.300.000,00	116,85	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	310.901.500,00	674.201.500,00	363.300.000,00	116,85	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.628.915.000,00	1.115.890.500,00	(513.024.500,00)	(31,49)	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik daerah	27.443.000,00	14.843.000,00	(12.600.000,00)	(45,91)	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	170.617.000,00	62.930.000,00	(107.687.000,00)	(63,12)	
5.2.2.14.05	Belanja pakaian muslim dan muslimah	166.475.000,00	99.600.000,00	(66.875.000,00)	(40,17)	
5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam latihan	279.935.000,00	243.800.000,00	(36.135.000,00)	(12,91)	
5.2.2.14.07	Belanja pakaian seragam peserta	864.110.000,00	647.482.500,00	(216.627.500,00)	(25,07)	
5.2.2.14.08	Belanja pakaian Dharma Wanita	84.035.000,00	10.935.000,00	(73.100.000,00)	(86,99)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.239.930.401,00	9.506.570.661,00	(11.733.359.740,00)	(55,24)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.282.762.600,00	2.120.559.500,00	(2.162.203.100,00)	(50,49)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.757.167.801,00	7.386.011.161,00	(9.371.156.640,00)	(55,92)	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.378.474.355,00	6.529.716.400,00	(9.848.757.955,00)	(60,13)	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.959.638.955,00	627.809.000,00	(4.331.829.955,00)	(87,34)	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	679.352.000,00	190.052.000,00	(489.300.000,00)	(72,02)	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	4.691.367.900,00	1.879.311.400,00	(2.812.056.500,00)	(59,94)	
5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	6.048.115.500,00	3.832.544.000,00	(2.215.571.500,00)	(36,63)	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.123.165.042,00	10.242.712.203,00	(1.880.452.839,00)	(15,51)	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.230.485.176,00	2.230.485.176,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	989.180.790,00	989.180.790,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung kantor	3.672.297.889,00	3.672.585.133,00	287.244,00	0,01	
5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	1.781.031.383,00	796.656.300,00	(984.375.083,00)	(55,27)	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan rumah dinas	1.133.265.000,00	943.095.000,00	(190.170.000,00)	(16,78)	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharan / perawatan tanaman	853.705.304,00	647.790.304,00	(205.915.000,00)	(24,12)	
5.2.2.20.08	Belanja pemeliharaan instalasi Listrik dan jaringan air	407.394.000,00	210.744.000,00	(196.650.000,00)	(48,27)	
5.2.2.20.10	Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor	689.847.000,00	471.167.000,00	(218.680.000,00)	(31,70)	
5.2.2.20.11	Belanja pemeliharaan perlengkapan rumah dinas / jabatan	110.000.000,00	41.250.000,00	(68.750.000,00)	(62,50)	
5.2.2.20.16	Belanja Jasa Pengelolaan Lahan Pertanian	229.758.500,00	229.758.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Lingkungan Kantor	26.200.000,00	10.000.000,00	(16.200.000,00)	(61,83)	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.943.229.454,00	1.956.882.654,00	(986.346.800,00)	(33,51)	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	352.752.400,00	187.252.400,00	(165.500.000,00)	(46,92)	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.067.577.134,00	830.277.534,00	(237.299.600,00)	(22,23)	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	458.679.920,00	440.132.720,00	(18.547.200,00)	(4,04)	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Penyusunan	1.064.220.000,00	499.220.000,00	(565.000.000,00)	(53,09)	
5.2.2.22	Belanja rehabilitas bangunan / tempat	1.367.186.200,00	666.183.000,00	(701.003.200,00)	(51,27)	
5.2.2.22.01	Belanja rehabilitas halaman, bangunan, gedung / kantor	1.359.186.200,00	658.183.000,00	(701.003.200,00)	(51,58)	
5.2.2.22.02	Belanja Perawatan Rehabilitas Taman Makam Pahlawan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23	Belanja Barang Modal Untuk Pihak Ketiga	26.171.734.580,00	14.016.365.241,00	(12.155.369.339,00)	(46,44)	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.936.234.580,00	13.791.365.241,00	(12.144.869.339,00)	(46,83)	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	235.500.000,00	225.000.000,00	(10.500.000,00)	(4,46)	
5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.960.000.000,00	3.960.000.000,00	(12.000.000.000,00)	(75,19)	
5.2.2.25.08	Belanja Bahan BLUD	15.960.000.000,00	3.960.000.000,00	(12.000.000.000,00)	(75,19)	
5.2.3	**Belanja Modal**	347.589.947.945,04	254.342.316.752,00	(93.247.631.193,04)	(26,83)	
5.2.3.03	Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	11.599.574.000,00	6.209.574.000,00	(5.390.000.000,00)	(46,47)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.03.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.03.10	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	2.154.040.000,00	2.154.040.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.03.12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	1.339.500.000,00	1.299.500.000,00	(40.000.000,00)	(2,99)	
5.2.3.03.13	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.03.16	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor operasional kedinasan	6.106.034.000,00	1.756.034.000,00	(4.350.000.000,00)	(71,24)	
5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	180.950.000,00	180.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.06.01	Belanja Modal Pengadaan Perahu Layar	180.950.000,00	180.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	88.508.000,00	43.275.000,00	(45.233.000,00)	(51,11)	
5.2.3.08.06	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	88.508.000,00	43.275.000,00	(45.233.000,00)	(51,11)	
5.2.3.09	Belanja modal pengadaan alat-alat pengelohan pertanian dan peternakan	1.661.172.000,00	1.611.172.000,00	(50.000.000,00)	(3,01)	
5.2.3.09.09	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.09.12	Belanja modal pengadaan Alat-alat Pertanian	1.655.232.000,00	1.605.232.000,00	(50.000.000,00)	(3,02)	
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.334.334.000,00	2.668.714.000,00	(1.665.620.000,00)	(38,43)	
5.2.3.10.02	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	23.000.000,00	8.500.000,00	(14.500.000,00)	(63,04)	
5.2.3.10.12	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat	3.200.000.000,00	1.600.000.000,00	(1.600.000.000,00)	(50,00)	
5.2.3.10.13	Belanja modal Pengadaan mesin ginset	939.200.000,00	939.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.10.16	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Bahan Pelatihan / Kursus	28.934.000,00	23.934.000,00	(5.000.000,00)	(17,28)	
5.2.3.10.17	Belanja modal Pengadaan vacum Cleaner	22.480.000,00	17.480.000,00	(5.000.000,00)	(22,24)	
5.2.3.10.19	Belanja modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.10.20	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi	29.120.000,00	0,00	(29.120.000,00)	(100,00)	
5.2.3.10.21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	79.600.000,00	79.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan perlengkapan kantor	3.191.303.525,04	2.362.676.000,00	(828.627.525,04)	(25,97)	
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan Almari	299.875.000,00	178.260.000,00	(121.615.000,00)	(40,56)	
5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filing kabinet	62.990.000,00	29.540.000,00	(33.450.000,00)	(53,10)	
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	92.919.500,00	38.100.000,00	(54.819.500,00)	(59,00)	
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	2.258.110.906,54	1.933.078.000,00	(325.032.906,54)	(14,39)	
5.2.3.11.09	Belanja modal Pengadaan papan data	115.635.118,50	4.882.000,00	(110.753.118,50)	(95,78)	
5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan gordyn	172.587.000,00	93.830.000,00	(78.757.000,00)	(45,63)	
5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan pengaman jendela / terali besi	88.500.000,00	12.000.000,00	(76.500.000,00)	(86,44)	
5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kebersihan	7.000.000,00	1.000.000,00	(6.000.000,00)	(85,71)	
5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tikar Ambal	84.006.000,00	62.306.000,00	(21.700.000,00)	(25,83)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.11.17	Belanja Modal Pengadaan Brankas	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.337.142.863,00	9.893.320.634,00	(1.443.822.229,00)	(12,74)	
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	528.000.000,00	508.000.000,00	(20.000.000,00)	(3,79)	
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan komputer/PC	4.482.389.000,00	4.181.524.134,00	(300.864.866,00)	(6,71)	
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book	509.455.000,00	37.560.000,00	(471.895.000,00)	(92,63)	
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	681.761.308,00	338.739.000,00	(343.022.308,00)	(50,31)	
5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scaner	44.790.000,00	17.690.000,00	(27.100.000,00)	(60,50)	
5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	4.132.274.500,00	4.021.248.500,00	(111.026.000,00)	(2,69)	
5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboar, harddisk,speaker)	68.247.055,00	35.870.000,00	(32.377.055,00)	(47,44)	
5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan jaringan internet	757.130.000,00	694.230.000,00	(62.900.000,00)	(8,31)	
5.2.3.12.12	Belanja Modal Pengadaan catride komputer	133.096.000,00	58.459.000,00	(74.637.000,00)	(56,08)	
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.321.724.668,00	3.060.451.000,00	(1.261.273.668,00)	(29,18)	
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	465.754.000,00	304.014.000,00	(161.740.000,00)	(34,73)	
5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	97.998.000,00	97.998.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	69.520.000,00	69.520.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	447.685.000,00	213.725.000,00	(233.960.000,00)	(52,26)	
5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	11.150.000,00	9.325.000,00	(1.825.000,00)	(16,37)	
5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	255.583.268,00	222.380.000,00	(33.203.268,00)	(12,99)	
5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ Tv/ Kembang	70.225.000,00	26.775.000,00	(43.450.000,00)	(61,87)	
5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	25.100.000,00	12.500.000,00	(12.600.000,00)	(50,20)	
5.2.3.13.17	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur	2.855.709.400,00	2.086.214.000,00	(769.495.400,00)	(26,95)	
5.2.3.13.18	Belanja Modal Kursi Tamu	18.500.000,00	15.000.000,00	(3.500.000,00)	(18,92)	
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.395.484.000,00	1.293.384.000,00	(102.100.000,00)	(7,32)	
5.2.3.14.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor	1.317.980.000,00	1.243.880.000,00	(74.100.000,00)	(5,62)	
5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	27.322.000,00	24.322.000,00	(3.000.000,00)	(10,98)	
5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	34.682.000,00	22.682.000,00	(12.000.000,00)	(34,60)	
5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	12.000.000,00	2.500.000,00	(9.500.000,00)	(79,17)	
5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	149.982.000,00	66.532.000,00	(83.450.000,00)	(55,64)	
5.2.3.15.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan TV	55.250.000,00	11.800.000,00	(43.450.000,00)	(78,64)	
5.2.3.15.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	79.732.000,00	39.732.000,00	(40.000.000,00)	(50,17)	
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	954.290.716,00	624.786.000,00	(329.504.716,00)	(34,53)	
5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	241.100.000,00	204.550.000,00	(36.550.000,00)	(15,16)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	12.345.000,00	12.345.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	58.900.000,00	43.500.000,00	(15.400.000,00)	(26,15)	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Infokus LCD	326.586.000,00	235.231.000,00	(91.355.000,00)	(27,97)	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Wireless / Pengeras Suara	193.159.716,00	60.460.000,00	(132.699.716,00)	(68,70)	
5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Sound System	122.200.000,00	68.700.000,00	(53.500.000,00)	(43,78)	
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	467.226.700,00	440.326.700,00	(26.900.000,00)	(5,76)	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	267.500.000,00	260.500.000,00	(7.000.000,00)	(2,62)	
5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Parabola	7.820.000,00	420.000,00	(7.400.000,00)	(94,63)	
5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan GPS	21.987.000,00	19.987.000,00	(2.000.000,00)	(9,10)	
5.2.3.17.10	Belanja Modal Pengadaan Radio Repeater Link	159.419.700,00	159.419.700,00	0,00	0,00	
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	34.316.544.442,00	37.233.198.364,00	2.916.653.922,00	8,50	
5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kesehatan	34.316.544.442,00	37.233.198.364,00	2.916.653.922,00	8,50	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	124.335.337.505,00	84.455.710.505,00	(39.879.627.000,00)	(32,07)	
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	113.956.412.992,00	77.688.388.992,00	(36.268.024.000,00)	(31,83)	
5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pamflet	8.025.000,00	0,00	(8.025.000,00)	(100,00)	
5.2.3.21.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran/drainase	4.700.557.213,00	3.557.623.213,00	(1.142.934.000,00)	(24,31)	
5.2.3.21.10	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Jalan	5.670.342.300,00	3.209.698.300,00	(2.460.644.000,00)	(43,39)	
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	22.420.013.228,00	13.169.013.228,00	(9.251.000.000,00)	(41,26)	
5.2.3.22.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air	19.661.950.762,00	11.441.950.762,00	(8.220.000.000,00)	(41,81)	
5.2.3.22.05	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Kontruksi Jembatan	531.000.000,00	300.000.000,00	(231.000.000,00)	(43,50)	
5.2.3.22.06	Belanja Modal rahabilitas / pemeliharaan jembatan	2.190.562.466,00	1.390.562.466,00	(800.000.000,00)	(36,52)	
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	27.988.073.649,00	17.985.998.574,00	(10.002.075.075,00)	(35,74)	
5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	13.748.039.891,00	11.447.449.891,00	(2.300.590.000,00)	(16,73)	
5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Bersih/air minum	3.797.978.887,00	3.337.978.887,00	(460.000.000,00)	(12,11)	
5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tebing	1.638.807.629,00	774.307.629,00	(864.500.000,00)	(52,75)	
5.2.3.23.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Pembuang	7.357.742.327,00	1.541.242.327,00	(5.816.500.000,00)	(79,05)	
5.2.3.23.13	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan dan Saluran	1.433.004.915,00	872.519.840,00	(560.485.075,00)	(39,11)	
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.765.255.894,00	2.538.415.394,00	773.159.500,00	43,80	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	1.686.285.894,00	2.459.445.394,00	773.159.500,00	45,85	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	78.970.000,00	78.970.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	72.606.648.973,00	51.426.842.220,00	(21.179.806.753,00)	(29,17)	
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan Konstruksi/pembelian gedung kantor	8.784.710.465,00	8.613.660.465,00	(171.050.000,00)	(1,95)	
5.2.3.26.04	Belanja modal pengadaan Konstruksi/pembelian gedung gudang	450.000.000,00	100.000.000,00	(350.000.000,00)	(77,78)	
5.2.3.26.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan	348.200.000,00	348.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25.09	Belanja modal pengadaan Konstruksi/pembelian bangunan masjid/mushalla	5.687.197.333,00	5.628.420.833,00	(58.776.500,00)	(1,03)	
5.2.3.26.11	Belanja modal pengadaan Konstruksi bangunan pasar	2.747.281.000,00	0,00	(2.747.281.000,00)	(100,00)	
5.2.3.26.12	Belanja modal pengadaan Konstruksi bangunan pagar/gapura	3.754.225.108,00	2.659.225.108,00	(1.095.000.000,00)	(29,17)	
5.2.3.26.18	Belanja modal pengadaan Konstruksi bangunan	28.148.839.643,00	17.164.865.415,00	(10.983.974.228,00)	(39,02)	
5.2.3.26.19	Belanja modal pengadaan Konstruksi tempat parkir	123.498.300,00	118.518.300,00	(4.980.000,00)	(4,03)	
5.2.3.26.20	Belanja modal penataan halaman kantor	974.060.363,00	781.560.363,00	(192.500.000,00)	(19,76)	
5.2.3.26.23	Belanja modal pengadaan konstruksi MCK	2.202.427.008,00	1.853.745.008,00	(348.682.000,00)	(15,83)	
5.2.3.26.24	Belanja modal pengadaan sumur bor	3.300.435.896,00	363.903.416,00	(2.936.532.480,00)	(88,97)	
5.2.3.26.27	Belanja modal pengadaan konstruksi tiang bendera	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
5.2.3.26.39	Belanja modal pengadaan kosntruksi papan nama/pamflet	46.106.900,00	17.506.900,00	(28.600.000,00)	(62,03)	
5.2.3.26.40	Belanja modal pengadaan Rambu Lalu Lintas	425.000.000,00	30.000.000,00	(395.000.000,00)	(92,94)	
5.2.3.26.41	Belanja modal Perencanaan dan Pengawasan konstruksi bangunan	6.413.419.178,00	5.091.628.633,00	(1.321.790.545,00)	(20,61)	
5.2.3.26.44	Belanja modal Pembuatan Kolam	195.429.031,00	195.429.031,00	0,00	0,00	
5.2.3.26.45	Belanja modal penataan ruangan kantor	495.788.950,00	669.608.950,00	173.820.000,00	35,06	
5.2.3.26.46	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana dan prasarana olahraga	4.469.599.798,00	3.785.657.798,00	(683.942.000,00)	(15,30)	
5.2.3.26.47	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan instalasi air	4.032.430.000,00	4.000.912.000,00	(31.518.000,00)	(0,78)	
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.037.863.774,00	179.947.300,00	(2.857.916.474,00)	(94,08)	
5.2.3.27.10	Belanja Modal Pengadaan Buku keagamaan	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	2.768.816.474,00	0,00	(2.768.816.474,00)	(100,00)	
5.2.3.27.22	Belanja Modal Pengadaan buku naskah	151.900.000,00	72.800.000,00	(79.100.000,00)	(52,07)	
5.2.3.27.23	Belanja Modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, compact disk)	67.347.300,00	57.347.300,00	(10.000.000,00)	(14,85)	
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	93.600.000,00	57.600.000,00	(36.000.000,00)	(38,46)	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	79.100.000,00	43.100.000,00	(36.000.000,00)	(45,51)	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	74.650.000,00	74.030.000,00	(620.000,00)	(0,83)	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	51.000.000,00	50.380.000,00	(620.000,00)	(1,22)	
5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi	159.999.000,00	84.999.000,00	(75.000.000,00)	(46,88)	
5.2.3.32.07	Belanja Modal Pengadaan Sistem Data Informasi	59.999.000,00	9.999.000,00	(50.000.000,00)	(83,33)	
5.2.3.32.08	Belanja Modal Pengadaan Sistem/Program Software	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)	
5.2.3.33	Belanja Alat-alat Bantuan Penyandang Cacat	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.33.01	Belanja Alat Bantu Penyandang Cacat	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34	Belanja Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	149.231.588,50	93.545.000,00	(55.686.588,50)	(37,32)	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Spring Bed	6.500.000,00	4.100.000,00	(2.400.000,00)	(36,92)	
5.2.3.34.02	Belanja Modal Pengadaan Bed Caver/Sprei/Taplak Meja	140.931.588,50	89.445.000,00	(51.486.588,50)	(36,53)	
5.2.3.34.04	Belanja Modal Pengadaan Permadani/Ambal	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.35.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.36	Belanja Modal BLUD	3.556.438.000,00	3.556.438.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel	196.438.000,00	196.438.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	78.599.586,50	72.600.000,00	(5.999.586,50)	(7,63)	
5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	5.999.586,50	0,00	(5.999.586,50)	(100,00)	
5.2.3.43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	225.000.000,00	135.000.000,00	(90.000.000,00)	(40,00)	
5.2.3.43.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum	225.000.000,00	135.000.000,00	(90.000.000,00)	(40,00)	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Keamanan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.799.962.893,00	14.533.500.893,00	(266.462.000,00)	(1,80)	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	8.300.000.000,00	8.255.350.000,00	(44.650.000,00)	(0,54)	
5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	3.022.500.000,00	2.885.410.000,00	(137.090.000,00)	(4,54)	
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.962.893,00	4.962.893,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	3.412.500.000,00	3.327.778.000,00	(84.722.000,00)	(2,48)	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.882.500.000,00	0,00	(1.882.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.882.500.000,00	0,00	(1.882.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	107.720.000,00	0,00	(107.720.000,00)	(100,00)	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	107.720.000,00	0,00	(107.720.000,00)	(100,00)	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	198.698.940,00	198.698.940,00	0,00	0,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	198.698.940,00	198.698.940,00	0,00	0,00	
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	32.118.000,00	32.118.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	32.118.000,00	32.118.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.000.000.000,00)	(5.311.991.766,26)	24.688.008.233,74	(82,29)	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	31.000.000.000,00	5.311.991.766,26	(25.688.008.233,74)	(82,86)	
6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	31.000.000.000,00	5.311.991.766,26	(25.688.008.233,74)	(82,86)	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.000.000.000,00	5.311.991.766,26	(25.688.008.233,74)	(82,86)	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.000.000.000,00	5.311.991.766,26	(25.688.008.233,74)	(82,86)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
6.2.2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
6.2.2.03	Badan Usaha Milik Swasta	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
6.2.2.03.01	Bank Aceh	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	30.000.000.000,00	5.311.991.766,26	(24.688.008.233,74)	(82,29)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
6.2.2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
6.2.2.03	Badan Usaha Milik Swasta	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
6.2.2.03.01	Bank Aceh	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	30.000.000.000,00	5.311.991.766,26	(24.688.008.233,74)	(82,29)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH UNTUK ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan Diktum Kesatu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Pencepatan Penanganan Corona, Virus Disease 2019 (COVID-19), mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Aceh perlu memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah penerima, sifat bantuan dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu untuk masing-masing jenis Belanja Bantuan Keuangan setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : ..../2

Scanned with CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun [illegible]
Pembentukan Provinsi [illegible]
Indonesia Tahun [illegible]
Republik Indonesia Nomor [illegible]
2. Undang-Undang Nomor [illegible]
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2[illegible]
Keuangan (Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik
4. Undang-Undang Nomor [illegible]
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Negara Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2[illegible]
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan..../3

Scanned with CamScanner

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [illegible] Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [illegible] Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor [illegible]);
15. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH UNTUK ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh bersifat khusus untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

(1) Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah), dengan Daftar Kabupaten/Kota Penerima dan Jumlah Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2) Alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh, meliputi:

a. penanganan..../4

Scanned with CamScanner

a. penanganan kesehatan;

b. ketahanan pangan;

c. pemberdayaan dampak ekonomi dan/atau

d. pengaturan pergerakan orang di per
Kabupaten/Kota perbatasan Aceh d

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota selaku p
dapat menyediakan tambahan dana
Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
program dan kegiatan Bantuan Keuangan
perundang-undangan.

Pasal 3

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam Tahun Anggaran 2020, setelah Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan transfer kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
   a. Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan berkenaan;
   b. Surat Permohonan Transfer;
   c. Kwitansi Tanda Terima;
   d. Berita Acara Serah Terima;
   e. Surat Pernyataan; dan
   f. Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten/Kota.
(2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selanjutnya harus dicantumkan dalam:
   a. Qanun Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020; atau
   b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang selanjutnya akan dicantumkan dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020, dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6..../5

Scanned with CamScanner

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota agar melaksanakan, mematuhi dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima dana Bantuan Keuangan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima dana Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
(4) Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima dana Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 8

(1) Sisa Lebih atas penggunaan sumber dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh, baik berupa sisa tender dan/atau sisa atas terjadi penghematan lainnya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.
(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipergunakan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan dan dapat digunakan kembali hanya untuk membiayai program dan kegiatan baru pada bidang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pemerintah Kabupaten/Kota menerima transfer Dana Bantuan Keuangan.
(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Scanned with CamScanner

Pasal 10

(1) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) ...
pemerintah bidang sebagaimana dima...
bersama Satuan Kerja Perangkat K...
melakukan monitoring dan evaluasi ...
pertanggungjawaban dan pelaporan...
rangka pencapaian target dan ...
ditetapkan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagai...
disampaikan kepada Gubernur ...
Inspektorat Aceh.

(3) Penggunaan dana Bantuan Keuangan ...
Internal Pemerintah (APIP) pada Pemerintah ...
Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Juli 2020
11 DzulQaidah 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Juli 2020
11 DzulQaidah 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 39

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH UNTUK ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020

A.SURAT PERMOHAN TRANSFER

KOP BUPATI/WALIKOTA

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Transfer.

.....2020

Yang Terhormat :
Bapak Gubernur Aceh
c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
di-
Banda Aceh

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam Perubahan APBA Tahun Anggaran 2020, dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor ..... Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020;
b. Kwitansi Tanda Terima;
c. Berita Acara Serah Terima;
d. Surat Pernyataan;
e. Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten/Kota;

Demikian dan terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA .....

(Materai 6.000)

(Nama Lengkap)

Scanned with CamScanner

B. KWITANSI TANDA TERIMA

NO. :
M.A. : 5.1.7.02.02
Tahun : 2020

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
Uang Banyaknya : [redacted]

YAITU : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
(sesuai Pasal 2 ayat (2)) Peraturan Gubernur Aceh Nomor
dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DOKA
Tahun Anggaran 2020

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh,

Bustami, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670722 199603 1 002

Materai 6000

Yang Menerima

Nama :
Pekerjaan : Bupati/Walikota
Alamat yang tetang :

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKA

Putri Sri Dewi, SE.Ak
NIP. 19731002 200604 2 001

Note :
(xxxxx) Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima

Scanned with CamScanner

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... dibawah ini :

1. Nama : Putri Sri Dewi, SE.Ak
   Nip : 19731002 200604 2 001
   Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan PPKA
   Dalam hal ini disebut *PIHAK PERTAMA*
2. Nama :
   Jabatan : Bupati/Walikota .....
   Alamat :

   Dalam hal ini disebut *PIHAK KEDUA*

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka..... (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang di bebankan pada Pos Belanja ..... pada DPPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor ..... Tahun ....., sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
BUPATI/WALIKOTA .....

Materai 6000

(Nama Lengkap)

PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran PPKA,

Putri Sri Dewi, SE.Ak
NIP. 19731002 200604 2 001

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh

Bustami, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670722 199603 1 002

Scanned with CamScanner

D. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (Nama Lengkap)

Pekerjaan : Bupati/Walikota .....

Alamat : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota..... dalam rangka ..... (sesuai Pasal 2 ayat (2) Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun ..... dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor..... Tahun ....., sebesar Rp..... dengan huruf).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan sebagai obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

BUPATI/WALIKOTA .....

Materai 6000

(Nama Lengkap)

Scanned with CamScanner

E. LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

Surat Tanda Telah Terima Transfer

Telah terima dari : Pemerintah Provinsi Aceh
Sejumlah : Rp. .....
Terbilang : .....

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana [illegible]
Pemerintah Kab. [illegible]
Tahap ... Tahun Anggaran 2020

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp. -
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp. -

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....
Nama Rekening : Kas Umum Daerah
Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang .....

....., ...

Bendahara Umum Daerah (BUD)
Kabupaten/Kota.....

(Materai 6.000)

Nama Lengkap
NIP .....

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IKIANSYAH

Scanned with CamScanner

Hasil Pembahasan/Konsultasi
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kabupaten/Kota

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan Pembahasan tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kabupaten/Kota bertempat di Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota (TAPK), dengan hasil Pembahasan, sebagai berikut :

1. Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kabupaten Nagan Raya disepakati sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (*Dua puluh milyar rupiah*) rincian terlampir.
2. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dipergunakan sesuai kebutuhan, dengan ruang lingkup:
   a. Penanganan Kesehatan sebesar Rp. 12.775.000.000,-
   b. Ketahanan Pangan sebesar Rp. 6.025.000.000,-
   c. Pemberdayaan Dampak Ekonomi sebesar Rp. 1.200.000.000,-
3. Ruang Rawat Covid-19 harus disediakan minimal 14 tempat tidur (Ricu dan Pinere) saat ini tersedia 6 tempat tidur di RSUD Sultan Iskandar Muda dan akan difungsionalkan 100% pada tanggal 13 Agustus 2020.
   Ruang isolasi khususnya petugas kesehatan dan Orang Tanpa Gejala (OTG) direncanakan gedung Rumah Sehat dan telah dioperasionalkan pada tanggal 14 April 2020.

Demikian hasil pembahasan ini dibuat dan akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Banda Aceh, 5 Agustus 2020

Tim Anggaran Pemerintah Aceh Sekretaris Daerah Aceh,	u.n. Sekretaris Daerah Kab. Nagan Raya Asisten Pemerintahan dan Kesra
dr. Taqwallah, M. Kes	Abdul Latif, MP
NIP. 19640504 199703 1 002	NIP. 19730713 200604 1 003

Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA)

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dlm TAPA	Tanda Tangan	Ket. Hadir
1	Dr. M. Jafar, SH, M. Hum	Asisten I	Wakil Ketua		Hadir
2	T. Ahmad Dadek, SH	Asisten II	Wakil Ketua		
3	Dra. Bukhari, MM	Asisten III	Wakil Ketua		
4	Bustami, SE, MSi		Wakil K		
5	Ir. Helvizar, MS				
6	Ir. Zulkifli, MSi				
7	Dr. Amrizal J. Prang, S				
8	T. Bobby Afan, S.Sos				